

**FUSI PARTAI-PARTAI ISLAM MENJADI PPP**

**PADA MASA AWAL ORDE BARU (1971 – 1973)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**

**UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)**

Disusun Oleh :

**A.Fuad**

NIM: 08120057

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM**

**FAKTULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

**UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Fuad  
NIM : 08120057  
Jenjang/Jurusan : S1/ Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23  
Januari 2015

Saya yang  
menyatakan,



**A.FUAD**  
NIM: 08120057

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**FUSI PARTAI-PARTAI ISLAM MENJADI PPP PADA MASA AWAL  
ORDE BARU (1971 – 1973)**

Yang ditulis oleh:

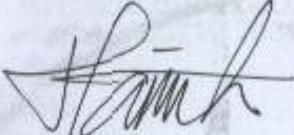
Nama : A. Fuad  
NIM : 08120057

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munawqasyah.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Dosen Pembimbing,

  
Fatiyah, S. Hum., MA.  
NIP: 19811206 201101 2 003.



## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DA/PP.009/ 364 /2015

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul:

**FUSI PARTAI-PARTAI ISLAM MENJADI PPP PADA MASA AWAL ORDE BARU  
(1971-1973 )**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : A.FUAD

NIM : 08120057

Telah dimunaqosahkan pada : Kamis,05 Februari 2015

Nilai Munaqosah : A/B

Dan telah dinyatakan diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Fatiyah, S. Hum., M.A  
NIP 19811206 201101 2 003

Pengaji I

Dr Nurul Hak, M. Hum  
NIP 19700117 199903 1 001

Pengaji II

Syamsul Arifin, S. Ag., M. Ag  
NIP 19680212 200003 1 001

Yogyakarta, 12 Februari 2015  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya



## **MOTTO HIDUP**

**“Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future” and “When you have never made a mistake, it means you have not tried anything.”**

Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan dan Ketika anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu berarti anda tidak pernah mencoba hal apapun.

## **PERSEMBAHAN**

Untuk:

Almamaterku Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Bapak, Ibu, kakakku Harianto, Dewi Aisyah, Ahm Subekhan, dan seluruh keponakanku Billy, Qiya, Syafira, Al Fino, Asrul dan seluruh keluargaku;

yang terhormat mbak istiqomah, mas Kibi.

## **Abstrak**

Umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. potensi ini sangat disadari oleh kalangan politikus partai-partai Islam dankarena itu adanya sebuah koalisi dari partai yang berbasiskan agama itu sangatlah di harapkan elit politik partai-partai islam.

Perjalanan parpol islam di indonesia dari sejak dulu hingga sekarang memang penuh liku-liku, mulai dikurangi peranannya pada masa demokrasi terpimpin, kemudian pasca demokrasi terpimpin pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai politik Islam melalui fusi partai politik dalam satu partai yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemaksaan akan fusi oleh Orde Baru membuat empat partai Islam yang sebelumnya terpisah dengan terpaksa harus bergabung ke dalam satu wadah partai yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Keempat partai tersebut ialah Partai NU, Parmusi, PSI dan Perti.

Dalam hal ini, peniliti berupaya mengkaji latar belakang ternjadinya kebijakan fusi partai politik yang dilakukan oleh Orde Baru kemudian juga latar belakang keempat partai sebelumnya yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan serta respon umat Islam tentang adanya fusi partai politik yang berpengaruh juga pada partai Islam.

Dalam meneliti kajian di atas, peneliti menggunakan teori Gabriel A. Almond, yaitu teori Stukrtural-Fungsional. Menurut Almond, bahwa “pada setiap sistem politik pasti terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi berlangsungnya kehidupan sistem politik itu sendiri. Tanpa fungsi-fungsi itu, tidak akan ada sistem politik.Sumber teori ini memusatkan perhatian pada usaha menemukan fungsi politik yang ada dalam suatu sistem politik dan kemudian menelaah struktur politik apa yang melaksanakan fungsi-fungsi itu. Jadi, menurut Almond, ciri-ciri universal yang pasti dimiliki oleh setiap sistem politik ialah adanya fungsi politik dan struktur politik tertentu.Sedangkan metode yang digunakan dalam kajian ini meliputi tahapan-tahapan mulai dari Heuristic atau tahap

Pengumpulan Data, Verifikasi atau seleksi dan kritik, Interpretasi atau analisa dan Historiography, penulisan atau penyajian.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang sejarah singkat keempat partai politik Islam sebelum terjadinya fusi yaitu Partai NU, Parmusi, PSI dan Perti. Kemudian menjelaskan latar belakang upaya untuk menerapkan kebijakan fusi partai politik dan yang terakhir adalah proses tergabungnya partai politik Islam kedalam suatu wadah Partai Persatuan Pembangunan serta respon dari umat Islam khususnya para aktifis Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ  
وَعَلَى الْهُوَاءِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ.

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt. Yang dengan rahmat dan hidayah-Nya karya yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam pun selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw. Yang dengan perjuangannya keindahan Islam dapat dinikmati hingga saat ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Fusi Partai-Partai Islam Menjadi PPP Pada Masa Awal Orde Baru (1971-1973)” ini merupakan upaya penulis untuk memahami sejarah terjadinya fusi (penyederhanaan) dari berbagai partai politik Islam betsatu dalam wadah satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap akhir pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Sejarah dan Kebudayan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan pada penulisan ini. Oleh karena itu, segala masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan tersebut, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada diri pribadi penulis pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Fatiyah S.Hum.,MA, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu BudayaUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Sejarah dan Kebudayan Islam.
4. Ibu DRA. Himayatul Ittihadiah, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Adab dan Ilmu BudayaUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segenap ilmunya kepada penulis, khususnya Staf Pengajar Jurusan Sejarah dan Kebudayan Islam.
6. Seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Adab dan Ilmu BudayaUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuannya selama ini.
7. Untuk kedua orang tuaku, **Bapak Sudarman** dan **Ibu Ngatini** yang selalu mendoakanku dalam menyelesaikan kuliah serta seluruh keluargaku, kakak-kakaku yang telah mendukung hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Seluruh teman-teman SKI,Ahc Sulaiman (Seniman), Budi Hartono (Arjuna Cinta), Moh Hamli (Pengusaha), Juma'(Sejarawan), Faidi(Ketua BEM-F), Yuni (Ketua BEM-J SKI),Halimah (Ketua Korp Kompak), Zainuddin (Ketua Cabang PMII DIY), Rahem (Cerpenis), Oppi(Aktivis), Rita, Yudha, Maisaroh, Aris, Lili, Romadhon (Penulis), Jakfar Shodiq (Politikus PMII), Rois (Ketua MASKARA), Khojin (Pengusaha), atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

9. Sahabat Korp KOMPAK Rayon Civilcommunity Fak Adab dan Ilmu Budaya, terima kasih atas doa, dorongan, nasihat, pengertian dan bantuannya yang tiada henti memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga Besar PMII D.I. Yogyakarta yang sudah wadah bagi penulis menjadi media belajar diluar kampus.
11. Sahabat-sahabat di keluarga besar MASKARA yang sudah menjadi bagian dari keluarga baru bagi penulis selama berada di yogyakarta.
12. Kepada saudaraku tercinta dirumah Mas Harianto, Mbak Dewi Aisyah, Mas Subekhan yang telah memberikan bantuan pikiran serta tenaganya dengan penuh perhatian tulus ikhlas pada penulis dalam upaya menyelesaikan pendidikan SI.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 Januari 2015 M.

Penulis,



A.Fuad  
NIM: 08120057

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. BatasanRumusanMasalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. TinjauanPustaka .....	8
E. LandasanTeori .....	10
F. MetodePenelitian .....	12
G. SistematikaPembahasan .....	14

### BAB II: SITUASI POLITIK DALAM MASA TRANSISI ORDE LAMA MENUJU ORDE BARU

A. Partai Politik dan Teori Pengambilan Kebijakan .....	16
B. Kondisi Politik Akhir Orde Lama.....	20
C. Kondisi Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru.....	23
D. Orde Baru dan Latar Belakang Fusi Partai-Partai Politik.....	28

### BAB III: DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM: DARI MULTI PARTAI KE ARAH FUSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

A. Partai-partai Politik Islam Masa Awal Orde Baru.....	33
1. Nahdhatul Ulama (NU).....	33
a. Masa Permulaan Menjadi Partai.....	33
b. Masa Perjuangan dan Pergolakan (1955-1968).....	37
c. Masa Orde Baru.....	45
2. PERTI.....	47
a. Sejarah Berdirinya PERTI.....	47
b. Peran dan Pergerakan PERTI.....	50
3. Partai Syarikat Islam Indonesia.....	54

a.	Tjokroaminoto Sang Pelopor PSII.....	54
b.	Konflik Dalam Perekembangan SI.....	60
4.	PARMUSI.....	71
B.	Multi Partai Politik Islam Berfusi Ke Arah PPP.....	74
1.	Fusi Partai-Partai Politik Sebelum Pemilu 1971.....	74
2.	Fusi partai-Partai Politik Pada Tahun 1973.....	75
3.	Partai Politik Islam Berfusi Tahun 1973.....	77
C.	Pengaruh dan Respon Lahirnya PPP Bagi Umat Islam.....	84
1.	Terbatasnya Aspirasi Umat Islam.....	84
2.	Respon Aktivis Politik Islam.....	88
<b>BAB IV: PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran-Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		99
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		105
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		128

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Dalam mengikuti sejarah pemilu di Indonesia dari jaman dulu hingga sekarang memang penuh lika-liku yang menarik. Partai politik sendiri merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi dan tujuan yang sama, yakni memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan-kedudukan guna manifestasi kebijakan-kebijakan politik mereka.<sup>3</sup> Perlu kita ketahui bahwa Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu yang mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan.

Partai politik (parpol) adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan nilai dan idiosiologi tertentu melalui struktur kekuasaan, dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan di dalam pemilihan umum.<sup>4</sup> Adapun di Indonesia, gerakan politik nasional yang pertama kali muncul adalah Sarekat Dagang Islam (tahun 1911) yang akhirnya berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912, SI sendiri sejak awal kemunculanya merupakan gerakan politik. Tidak hanya

---

<sup>3</sup>. Mirian Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal 160.

<sup>4</sup>.Sigit Pamungkas, *Teori Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: institute for Democracy and wellfarism, 2011), hal.5

sarekat Islam, sebenarnya pada tanggal 6 September 1912 telah berdiri *Indische Partij* bentukan Ernest Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo serta Suwardi Suryaningrat yang salah satu tujuanya adalah mempersatukan semua golongan sebagai persiapan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Munculnya SI kemudian diikuti dengan munculnya gerakan-gerakan politik lainnya, mulai dari munculnya Partai Arab Indonesia (PAI) pimpinan AR Baswedan pada tahun 1934. Satu dekade kemudian tepatnya pada tanggal 7 November 1945 berdirilah partai Masyumi. Dalam perkembangannya gerakan politik di Indonesia sempat mengalami masa sulit ketika era pendudukan Jepang, selama Jepang menjajah Indonesia seluruh kegiatan partai poltik dilarang, namun itu tidak berlaku bagi golongan Islam yang sudah membentuk partai Masyumi.<sup>5</sup> Partai ini di dukung oleh dua kekuatan ormas besar yaitu NU dan Muhamadiyah, akan tetapi dalam perjalanan serta perkembangannya kemudian para pendukung Masyumi satu persatu menyatakan diri keluar dari partai tersebut. Bermula dari keluarnya PSII pada tahun 1947, kemudian diikuti NU tahun 1952. Hal ini mengakibatkan semakin melemahnya kekuatan posisi Islam dalam kancah politik nasional.

Pada pemilu 1955 secara nasional Masyumi menduduki urutan kedua setelah PNI. Tetapi yang sukar dibantah dalam pemilu 1955 adalah kekuatan Islam terpecah-pecah menjadi 6 partai, hal ini juga makin diperparah dengan diberlakukannya konsep Negara dalam bentuk Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM) pada masa demokrasi terpimpin oleh pemerintahan Soekarno, gagasan ini hanya di setujui oleh 3 partai, PNI, NU dan PKI. Sementara

---

<sup>5</sup>. Mariam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Gramedia Pustaka ,2008), hlm. 171.

Masyumi yang tidak setuju dengan gagasan tersebut dianggap sebagai kontra revolusi. Sehingga Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960.

Setelah runtuhan rezim Orde Lama dan Partai Komunis Indonesia (PKI), ini merupakan titik awal lahirnya sistem pemerintahan baru yang lebih di kenal dengan masa Orde Baru. Salah satu program awal dari pemerintah Orde Baru adalah untuk melaksanakan pembaharuan bidang politik berdasarkan, TAP MPRS Nomor XXII tahun 1966 yang menyebutkan perlu adanya pembaharuan politik. Dengan demikian kekuatan politik Orde Baru diharapkan tidak berorientasi pada ideologi saja tetapi lebih kepada program. Umat Islam mempunyai harapan yang sangat besar dengan akan kembalinya masyumi dalam kancan politik nasional. Namun semua itu hanya harapan kosong, sebab penguasa Orde Baru melarang Partai Masyumi kembali lagi menjadi partai politik. Sebagai gantinya, pada tanggal 5 Februari 1968 rezim Orde Baru mengizinkan dibentuknya Parmusi, tujuan didirikannya Parmusi adalah tidak lain untuk mencegah munculnya Neo-Masyumi.<sup>6</sup>

Tindakan pemerintah Orde Baru tidak cukup sampai di sini saja, dengan alasan menstabilitaskan politik sebagai prasarat pembangunan ekonomi, rezim orde baru kemudian melaksakan penyederhanaan partai-partai politik Islam melalui sistem fusi partai menjadi satu wadah partai yang disebut dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai fusi dari empat partai Islam,yakni Partai

---

<sup>6</sup>. Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2008), hlm 83.

Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), usai pemilu 1971.

Sistem fusi partai adalah sistem penyederhanaan atau pengerucutan terhadap partai-partai politik yang dianggap mempunyai ideologi politik sama yang kemudian digabungkan menjadi satu wadah partai politik, dan inilah yang terjadi terhadap partai-partai politik yang berasaskan Islam di Indonesia yaitu: Penyederhanaan, jumlah partai inilah yang juga menjadi ciri yang paling menonjol dari perkembangan partai politik pada era Orde Baru yang pada akhirnya membagi partai-partai yang ada menjadi 3 kelompok besar.

Kelompok yang pertama disebut kelompok spiritual material, kedua kelompok Nasionalis dan yang ketiga masuk dalam kelompok karya, tiga kelompok itu dibedakan dalam 3 partai besar yaitu: PPP, PDI dan Golkar. Anjuran pengelompokan ini pada dasarnya diterima oleh semua partai politik, kecuali Partai Katolik dan Parkindo yang lebih senang mengelompokan dirinya dengan kelompok nasionalis<sup>7</sup>. Dalam hal ini, kebijakan fusi partai politik merupakan bagian terpenting dari strategi Golkar (Partai Pemerintah) untuk membangun hegemoni politik. Di samping itu, kebijakan fusi partai politik tersebut menandakan bahwa pemerintah yang telah berkembang jauh untuk melakukan intervensi terhadap partai-partai politik. Akibat dari penyederhanaan ini dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya hanya diikuti oleh 3 partai politik dan hal ini berlangsung hingga tahun 1998, yaitu: PPP, Golkar dan PDI.

---

<sup>7</sup>. Umaidi Radi, *Strategi PPP 1973 -1982 : Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, ( Jakarta: Integritas Press, 1984 ), hlm. 76.

Hasil dari praktik politik (hegemonic party system) selama ini adalah kemenangan Golkar pada pemilu-pemilu sesudah tahun 1973. Golkar pun kemudian berkembang menjadi regulator politik tunggal dalam pemerintahan dan dalam segala dinamika kehidupan masyarakat. Dengan kemenangan mutlak dalam pemilu, Golkar berhasil membangun hegemoni politik seolah tanpa pesaing. Sementara, melalui tangan pemerintah, perkembangan PPP dan PDI terus dikelola agar tetap menjadi pelengkap atau pemanis semata dan sistem kepartaian yang demikian itu disebut dengan “sistem kepartaian setengah partai”.<sup>8</sup>

Proses marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah rezim Orde Baru itu tidak berhenti hanya di situ saja dan terus berlanjut dengan memberlakukannya asas tunggal Pancasila yang akhirnya menjadikan PPP sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam yang kemudian mengharuskan partai politik Islam menanggalkan asas Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila.<sup>9</sup>

Kita ketahui, pada masa awal kelahiranya, 5 Januari 1973 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan lahir dari fusi partai politik Islam dianggap sebagai simbol kekuatan, satu-satunya partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam, maka tidak salah jika PPP memproklamirkan sebagai “rumah besar Umat Islam”. Oleh sebab itulah lambang yang digunakan adalah lambang Ka’bah. Akan tetapi dalam

---

<sup>8</sup>. Deliar R. Noer, *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Penghidmahan, 1983 ), hlm. 73.

<sup>9</sup>. Masykur Hasyim, *Menusantarkan Politik Islam: Perjalanan Panjang Partai Persatuan Pembangunan*, (Surabaya: Yayasan Sembilan Lima, 2002), hlm 64-65

perjalannya karena tekanan kekuatan dan kekuasaan politik Orde Baru, PPP pernah meninggalkan asas ke-Islamanya dan menggunakan asas Pancasila sesuai peraturan pemerintah menggunakan lambang bintang yang terdapat pada lambang Pancasila sejak 1984. Sekalipun demikian, meski ditengah marginalisasi politik Orde Baru, PPP tetap berusaha konsisten untuk memperjuangkan platform fundamental politiknya. Pergantian lambang dan asas partai menjadi lembaran sejarah baru bagi PPP.

Pasca diberlakukannya sistem fusi partai, sejarah perjalanan partai politik Islam bisa dibilang tidak pernah maksimal memainkan perannya, bahkan partai Islam di luar dugaan kembali hanya menjadi pelengkap penderita pemilu-pemilu berikutnya dan ini jelas berbeda ketika awal-awal berdirinya Partai Masyumi dan Partai Nahdhatul Ulama (NU)<sup>10</sup>.

Dengan demikian, menarik bagi penulis untuk melakukan penelusuran serta penelitian tentang perjalanan dan perkembangan partai-partai politik Islam terkait keterlibatanya dalam menjalankan sistem pemerintahan baik ideologi maupun kontribusinya dalam setiap keikutsertaannya pada pemilihan umum pasca diberlakukannya sistem fusi partai hingga era reformasi.

Proses penyederhanaan yang terjadi pada awal Orde Baru masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Apalagi generasi yang lahir setelah kebijakan fusi itu diterapkan. Dalam dunia politik, sebagian Negara menerapkan kebijakan ini. Tujuan agar mudah dikontrol atas nama demokrasi pun itu adalah

---

<sup>10</sup>.Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, ( Bandung: Mizan, 1997 ), hlm.

sah. Banayak terori politik yang membahas masalah ini, akan tetapi kenijakan ini pula yang mengakibatkan bertahannnya rezim Orde Baru samapi 32 tahun.

Lebih lanjut yang penting dalam melakukan penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui proses dan sejarah latar belakang yang terjadi fusi yang dilakukan oleh partai-partai Islam atas “paksaan Orde Baru itu, sehingga menemukan sebuah peristiwa sejarah penting yang terjadi terhadap partai-partai Islam awal pada awal Orde Baru ini.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada kajian sejarah politik dari partai-partai politik Islam dalam menghadapi tantangan sistem fusi partai yang diterapkan oleh pemerintah rezim Orde Baru. Selanjutnya agar kajian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penelitian ini akan dibatasi dan akan dipandu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya fusi atau penyederhanaan partai politik oleh Orde Baru?
2. Bagaimana proses partai-partai Islam melakukan fusi menjadi satu naungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ?
3. Apa pengaruh dan tanggapan para aktivis politik Islam tentang PPP?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pastinya mempunya tujuan dan kegunaan bagi peneliti pada khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara detail tentang latar belakang sejarah diberlakukanya fusi atau penyederhanaan partai politik pada Orde Baru
2. Untuk mengetahui bagaimana partai-partai Islam melakukan fusi dalam satu waah partai.
3. Untuk Mengetahui tanggapan para aktivis politik Islam yang mengalami fusi partai dari kebijakan pemerintah Orde Baru.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberi wawasan dan pemahaman serta informasi kepada publik terkait sistem politik yang ada di Indonesia.
2. Sebagai sumbangan kepustakaan bagi dunia ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya.
3. Untuk lebih lanjut memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang sejarah keberadaan dari partai-partai politik Islam di Indonesia.
4. Menambah khasanah ke ilmuan khususnya bidang ilmu sejarah.

## D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan pengamatan dan penelusuran baik yang berbentuk buku, skripsi, artikel, maupun makalah yang dapat dijadikan bahan perbandingan atau rujukan dalam usaha untuk melengkapi penelitian ini, beberapa karya yang penulis temukan yang mengangkat tentang perjalanan partai politik islam, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Pujiyono dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul "*Kebijakan Politik Orde Baru Tentang Fusi (Penyempitan) Parpol Perspektif Hukum Islam*". Dalam skripsi ini mefokuskan penelitiannya pada bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kebijakan fusi partai politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru.

Karya skripsi lainnya dari saudari Iif Rifqiyah Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1992 yang berjudul "*Sikap Syarikat Islam terhadap Kebijakan Orde Baru Tentang Fusi Partai Politik (1970-1977)*", skripsi ini menjelaskan apa landasan serta tujuan pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan tentang fusi partai-partai politik Islam dan menjelaskan bagaimana sikap Syarikat Islam terhadap kebijakan tersebut.

Ada juga buku karya R. Willam Liddle yang berjudul "*pemilu-pemilu Orde Baru (Pasang Surut Kekuasaan Politik)*", buku karya Kuntowijoyo "*Identitas Politik Umat Islam*", buku Abdul Azizi "*Politik Islam Politik (Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam)*.

Dalam karya-karya tersebut di atas, kesemuanya menyinggung tentang kebijakan pemerintah Orde Baru terkait diberlakukannya peraturan sistem fusi partai-partai politik Islam pasca pemilu 1971.

Terkait karya-karya di atas, baik buku maupun skripsi memang memiliki beberapa kesamaan yaitu membahas tentang kebijakan Orde Baru dalam hal penyempitan partai-partai politik Islam. Meskipun demikian pembahasan terkait perjalanan kekuasaan maupun perkembangan yang dialami oleh partai politik Islam pasca diterapkannya kebijakan fusi, sampai dihadapkannya pada perkembangan ideologi politik Islam masa reformasi 1998, sejauh ini penulis belum menemukannya. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan ini lebih kepada sejarah perjalanan partai-partai politik Islam di Indonesia pasca fusi.

Seperti diketahui, perkembangan Islam dalam mengikuti roda politik di Indonesia telah turut serta merasakan pahit manisnya dalam menggapai sebuah kekuasaan, selain itu, sejarah partai-partai Islam boleh dibilang hampir tidak pernah maksimal memainkan peranannya. Selain itu, penulis juga membahas serta menelusuri sejauh mana perkembangan ideologi politik partai-partai politik Islam dalam mengikuti perkembangan politik di era reformasi.

## E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori Gabriel A. Almond, yaitu teori Stuktural-Fungsional. Menurut Almond, bahwa “pada setiap sistem politik pasti terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi berlangsungnya kehidupan sistem

politik itu sendiri. Tanpa fungsi-fungsi itu, tidak akan ada sistem politik.<sup>11</sup>

Sumber teori ini memusatkan perhatian pada usaha menemukan fungsi politik yang ada dalam suatu sistem politik dan kemudian menelaah struktur politik apa yang melaksanakan fungsi-fungsi itu. Jadi, menurut Almond, ciri-ciri universal yang pasti dimiliki oleh setiap sistem politik ialah adanya fungsi politik dan struktur politik tertentu.

Fungsi politik yang ada dalam setiap sistem politik dapat dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, fungsi input, yaitu artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan fungsi output yaitu pembuatan, penerapan, dan penghakiman kebijaksanaan. Struktur politik didefinisikan sebagai suatu pola interaksi yang dianggap sah, yang tujuannya mempertahankan dan memelihara tata masyarakat. Dalam masyarakat politik modern terdapat struktur-struktur politik seperti kelompok kepentingan, partai politik, birokrasi, badan legislatif dan badan peradilan.<sup>12</sup>

Penelitian ini juga diperkuat dengan teori struktural fungsional, masyarakat (baik modern maupun tradisional) sebagai suatu sistem yang memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, dimana sebuah lembaga memiliki fungsinya masing-masing. Sebagai contohnya: lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya, lembaga keagamaan mempunyai fungsi membimbing pemeluknya untuk menjadi masyarakat yang baik dan penuh pengabdian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat,

<sup>11</sup> Mochtar Mas'oe dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Uogyakarta: Gadjah Mada University, 2001), hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid*. hlm. 27-31

begitu juga lembaga politik memiliki fungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Kesemua lembaga yang ada dimasyarkat itu akan senantiasa berinteraksi dan satu sama lain akan melaksanakan penyesuaian sehingga masyarakat akan senantiasa berada pada keseimbangan.<sup>13</sup>

Dengan landasan teori di atas, penulis berusaha menjawab dengan menganalisis dinamika sejarah pergumulan dan perjalanan partai-partai politik Islam ketika harus “menyerah” untuk bergabung menjadi satu wadah yang bernama *Partai Persatuan Pembangunan*. Ada tiga strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam antara lain, strategi struktural, kultural mobilisasi sosial. Setrategi struktural disini juga disebut sebagai strategi politik.

#### **F. Metode Penelitian**

Karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil penyelidikan secara ilmiah untuk menemukan, menggambarkan dan menyajikan kebenaran. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Maka dari itu metode yang digunakan metode penelitian historis<sup>14</sup>, selain itu jenis penelitian ini adalah jenis penelitian data skunder, analisa data skunder adalah jenis penelitian yang memanfaatkan data yang tersedia dan belum diperas sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna. Juga dapat berupa studi perbandingan dari studi-studi yang pernah dilakukan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> . Andree Feillard, *NU Vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta LKIS, 1999).

<sup>14</sup> . Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: logos wacana ilmu,1999), hlm. 54.

<sup>15</sup> . Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES,1989),hlm. 11.

Penelitian tentang sejarah merupakan sebuah kajian yang mendasarkan kepada kerangka ilmu. Artinya, sejarah tidak dapat terlepas dari metode-metode ilmiah. Dalam hal ini sejarah merupakan upaya terhadap rekonstruksi masa lalu yang terkait dengan mekanisme dan prosedur-prosedur ilmiah.<sup>16</sup> Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, Dalam penerapan metode ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1) *Heuristic* atau tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan data atau sumber-sumber tulisan partai-partai politik Islam yang memaparkan sejarah perjalanan partai-partai politik Islam pasca fusi atau perilaku politik partai-partai politik Islam di Indonesia. Hal ini di lakukan oleh penulis untuk menunjukan sebagaimana sifat dari penelitian skripsi ini, yaitu jenis penelitian dokumen.

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh negara tentang peraturan partai politik baik pada Orde lama maupun pada awal Orde Baru. Kemudian buku-buku, makalah-makalah yang ditulis oleh berbagai tokoh yang berkaitan tentang lahirnya PPP dan situasi partai politik akhir Orde Lama dan awal Orde baru. Contoh buku primer yaitu buku yang ditulis oleh Idham Cholid berupa outobiografi dengan editor Arif Mudatsir Mandan dan buku Kuntowijoyo yang berjudul *Identitas Politik Umat Islam*. Sedang sumber yang sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah sejarah

---

<sup>16</sup> . Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: bentang budaya, 2001), hlm.12.

yang terjadi pada masa itu yang ditulis seperti oleh Deliar Nor dan Syafi'i Ma'arif.

### 2) Verifikasi atau seleksi dan kritik

Dalam tahap ini, penulis melakukan proses menguji dan menyeleksi data dan sumber yang telah ada untuk memperoleh keabsahan sumber baik secara eksternal maupun internal. Sehingga penulis mendapatkan sumber yang mempunyai kredibelitas serta keotentikannya dan dapat digunakan sebagai data dan sumber dalam penulisan skripsi ini.

### 3) Interpretasi atau analisa

Dalam tahap berikutnya, setelah menyeleksi sumber yang ada terkait sejarah pertain politik pasca fusi sebagaimana di atas, kemudian penulis menganalisa dan mensintesakan sumber yang berkaitan dengan permasalahan sejarah perjaanan partai-partai politik Islam pasca fusi 1971 secara menyeluruh.

### 4) Historiography, penulisan atau penyajian.

Kemudian, dalam tahap ini penulis menyajikan karya ilmiah yang sistematis dngan merekonstrusi peristiwa-peristiwa masa lalu melalui data dan sumber yang telah didapat dan telah melewati tahapan-tahapan metode penulisan sejarah, sehingga terusun rangkaian fakta sjarah menjadi satu jalinan yang utuh.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini diperlukan suatu rangkaian yang sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menggambarkan dan menghasilkan hasil yang maksimum. Agar mendapatkan suatu hasil yang utuh (integrated), dan mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut ini.

Bab pertama adalah berupa pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka atau telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi, sehingga dalam penulisannya dapat dijelaskan secara sistematis sesuai yang telah ditentukan.

Bab kedua membahas sejarah munculnya partai NU, PSII, PARMUSI dan PERTI, serta perjalanan dan perkembangan politik mereka di Indonesia sampai terjadinya fusi di antara keempat partai tersebut.

Bab ketiga membahas tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya penyederhanaan partai politik Islam melalui fusi partai dalam satu nama Partai Persatuan Pembangunan serta bagaimana respon dan tanggapan para aktivis umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran berisi suatu saran yang membangun.

## **BAB II**

### **SITUASI POLITIK DALAM MASA TRANSISI ORDE LAMA MENUJU ORDE BARU**

#### **A. Partai Politik dan Teori Pengambilan Kebijakan**

Melihat sejarah sepanjang orde lama sampai orde baru partai politik mempunyai peran dan posisi yang sangat penting sebagai kendaran politik sekelompok elite yang berkuasa, sebagai ekspresi ide, pikiran, pandangan dan keyakinan kebebasan. Pada umumnya para ilmuan politik menggambarkan adanya empat fungsi partai politik, menurut Miriam Budiardjo meliputi:

1. Sarana komunikasi politik
2. Sosialisasi politik
3. Sarana rekruitmen politik
4. Pengatur konflik<sup>17</sup>

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait dimana politik berperan dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (Interests Articulation) dimana berbagai ide-ide diserap dan diadvokasikan sehingga dapat mempengaruhi materi kebijakan kenegaraan. Terkait sebagai sarana komunikasi politik, partai politik juga berperan mensosialisasikan ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik serta sebagai sarana rekruitmen kaderisasi pemimpin Negara. Sedangkan peran sebagai pengatur konflik, partai politik berperan menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Di samping itu, partai politik juga

---

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2000), hlm. 163-164

memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakasanaan, dalam arti bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga setelah mendapatkan kekuasaannya yang legitimasi maka partai politik ini akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, fungsi partai politik secara garis besar adalah sebagai kendaraan untuk memenuhi aspirasi warga Negara dalam mewujudkan hak memilih dan hak dipilihnya dalam kehidupan bernegara.

Partai sebagai kekuatan politik adalah baru bagi semua Negara di dunia ini, dalam arti umumnya tidak setua umur masyarakat manusia. Istilah partai politik itu sendiri baru muncul pada abad ke 19 M dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan dan meluasnya hak mereka yang biasa mengambil bagian dalam pemilihan umum.<sup>19</sup>

Selanjutnya, sejarah kepartaian di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dan merebut kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan kepartaian di Indonesia bertujuan untuk: (a) untuk menghapuskan penindasan dan pemerasan di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya (kolonialisme dan imperialisme), (b) untuk mencerdaskan bangsa Indonesia; (c) untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

---

<sup>18</sup> Abu bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2005), hlm. 41

<sup>19</sup> Daniel Dhakide, “Partai Politik dan Kepartaian di Indonesia”, dalam : *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, ( Jakarta: LP3ES: 1995), hlm. 189

Untuk melaksanakan tujuan utama di atas perlu ditentukan sasaran, yaitu:

- a. Kemerdekaan di bidang politik, ekonomi dan budaya nusa dan bangsa
- b. Pemerintahan Negara yang demokratis
- c. Menentukan Undang-undang Dasar Negara yang memuat ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang sesuai dengan nilai *sosialis* *paternalistic* yang agamis dan manusiawi<sup>20</sup>

Dari perjalanan sejarah kehidupan politik Indonesia tersebut, secara umum terdapat dari ciri utama yang mewarnai pendirian dan pergeseran masing-masing organisasi politik dan golongan fungsional yang ada, yaitu:

- a. Kesamaan Cara untuk melaksanakan geraka kehidupan politik, organisasi politik dan kesatuan yang bersumber pada kepentingan nasional dan bermuara pada kepentingan internasional. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut ditempuh melalui prinsip adanya kedaulatan rakyat Indonesia.
- b. Sedangkan landasan (faham, aliran atau ideologi) yang digunakan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan rakyat tersebut berbeda satu sama lain.

Kemudian, keberadaan partai politik-politik ini sesungguhnya untuk meramaikan pesta demokrasi sebagai tanda adanya atau berlangsungnya proses pemilihan umum. Dalam proses pemilihan ini, setidanya terdapat 3 (tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, antara lain: *pertama*, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib; *kedua* kemungkinan lembaga

---

<sup>20</sup> <http://www.legalitas.org/?q=node/63>, diakses tanggal 12 Januari 2015.

negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945; dan *ketiga*, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>21</sup>

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern. Sebagai suatu organisasi partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai.<sup>22</sup>

Apabila ditelusuri sejarah lahirnya partai-partai maka dapat dilihat bahwa kelahiran partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. tujuan kelompok tersebut untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara konstitusional untuk bisa melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan kelompoknya.<sup>23</sup> Partai politik memiliki fungsi sebagai instrumen untuk artikulasi atau agregrasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, partisipasi politik dan rekruitmen politik, yang secara historis dapat dilihat dari perjalanan partai politik di Indonesia meskipun terkadang tidak sepenuhnya seperti itu.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul bari Azed, “*Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*”, dalam : *Sistem-sistem Pemilihan Umum : Suatu Himpunan Pemikiran*, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2000), hlm 7

<sup>22</sup> Ichlasul Amal (ed), *Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1996), hlm xv

<sup>23</sup> Umaidi Raidi, *Strategi PPP 1973-1982:: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, (Jakarta: Integritas Press, 1984), hlm. 17

<sup>24</sup> Cheppy Hanj Cahyono dan Suparlan al-hakim, *Ensiklopedia Politika*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm 240.

## B. Kondisi Politik Akhir Orde Lama

Di masa Soekarno, kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi hal yang lumrah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya keterlibatan partai politik. Walaupun demikian tetap saja masyarakat Indonesia berada dalam semangat demokrasi terpimpin. Kekuasaan hanyalah terpusat pada Soekarno sebab bagi Soekarno, persatuan Indonesia harus menjadi konsep ideal yang harus dibumikan. Oleh karena itu Soekarno berusaha untuk menenggelamkan perbedaan-perbedaan ideologis ke dalam suatu kepercayaan nasional yang bersifat tunggal yang dikenal dengan Nasakom: nasionalisme, agama dan komunisme.<sup>25</sup>

Pencetusan ideologi ini tidak terlepas dari keyakinan Soekarno bahwa Nasakom mengandung lebih dari pada suatu gencatan senjata saja di antara musuh-musuh bebuyutan, maka gagasan ini akan bertahan walaupun ia sendiri sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, ideologi ini menjadi bahasa wajib ketika demokrasi terpimpin berkembang. Maka pembiasaan terhadap makna sejati nasakom yang dicita-citakan Soekarno menjadi hal yang biasa demi pencapaian tujuan politik tertentu. Akibatnya adalah semakin tingginya tingkat ketidakpastian politik dan kegelisahan dalam masyarakat. Dalam hal ini sejarah menunjukkan bahwa peran Partai Komunis Indonesia (PKI) begitu besar dalam perpolitikan Orde Lama. Sadar atau tidak sadar, kehadiran PKI justru memperkuat posisi

---

<sup>25</sup> Bdk Robert Cribb, 2001,*Bangsa: Menciptakan Indonesia dalam Indonesia Beyond Soeharto; Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi* (terj),PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hlm. 54.

Soekarno ketika berhadapan dengan partai-partai Islam dan militer khususnya dari angkatan darat.

Sistem multi partai ala Soekarno memang membuka keterlibatan masyarakat dalam menjalankan haknya untuk berserikat dan berkumpul. Namun tetap saja memberikan keterbukaan dan memperuncing perbedaan dalam masyarakat atau lebih tepatnya membangun batasan-batasan pandangan politik yang memiliki potensi besar terhadap kesatuan.<sup>26</sup> Soekarno tidak menyadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka. Ia tidak memahami bahwa masyarakat Indonesia lahir dengan ciri khas budaya masing-masing dan demikian cinta kedaerahan menjadi mutlak.

Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno dilihat sebagai cara terbaik demi terjaganya kesatuan bangsa merupakan pandangan yang keliru. Demokrasi Terpimpin hadir hanyalah untuk menjaga kekuasaan tetap berjalan. Maka sampai di sini, demokrasi dalam arti asalnya bukanlah merupakan gagasan yang penting.

Peristiwa jatuh bangunnya pemerintahan pada periode Orde Lama ditandai dengan seringnya perombakan kabinet dan begitu pendeknya umur jabatan perdana menteri dalam setiap masa jabatannya menjadi penyebab instabilitas politik. Pra pemerintahan Orde Baru, pemerintah Orde Lama memberikan warisan kepada Soeharto dalam benruk mega inflasi mencapai 650% ditambah persoalan kemiskinan akut merupakan pekerjaan bagi pemerintah Orde

---

26 Menurut Robert Cribb, merupakan sebuah keheranan akan adanya satu Indonesia sebab baginya sekumpulan pulau di Nusantara itu di dalamnya bisa terdapat beberapa negara. Hal ini merupakan hasil dari gagasan akan adanya kesatuan nasional yang dicita-citakan Soekarno. Bdk Robert Cribb, 2001,*Bangsa: Menciptakan Indonesia dalam Indonesia Beyond Soeharto; Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi (terj)*, hlm.3.

Baru. Akhirnya, stabilitas dan pembangunan ekonomi menjadi agenda utama yang mesti dipikul oleh rezim baru ini.<sup>27</sup>

Dalam kaitannya dengan Orde Lama hingga Orde Baru, Indonesia terus-menerus mencoba menemukan format ideal sebuah sistem politik. Partisipasi yang meluas pasca proklamasi kemerdekaan difasilitasi oleh *founding father* bangsa ini dengan membangun institusi-institusi politik. Lihat Maklumat X Wakil Presiden Moh. Hatta pada 3 November 1945 yang “tergesa-gesa” membuka kran partisipasi yang meluas dengan menganjurkan pembentukan partai-partai politik karena melihat kondisi politik Indonesia masih “gaduh” salah satunya karena perjuangan yang belum berakhir dalam merumuskan dasar negara Indonesia pasca “penghianatan” oleh kelompok nasionalis sekuler yang sedang konflik dengan rivalnya kalangan nasionalis Islami, akibat penghapusan tujuh kata pada teks Piagam Jakarta yang sebelumnya telah diputuskan dengan musyawarah mufakat, tidak ada perubahan ke arah “sekulerisasi” ajaran Islam.<sup>28</sup>

Partisipasi politik masa itu berjalan dengan hingar-bingar, terutama melalui saluran politik yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan nilai-nilai primordialisme yang tumbuh ditengah masyarakat. Menelaah keadaan praktik politik sepanjang 1945-1965 memperlihatkan dalam rentang waktu 20 tahun stabilitas pemerintahan berada dalam keadaan yang amat memprihatinkan, dalam rentang waktu pemerintahan Orde Lama Indonesia mengalami 25 kali pergantian

---

<sup>27</sup> Lihat M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut*, 1983, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 55

<sup>28</sup> Eep Saefulloh Fatah, 2000, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 19

kabinet, dan tidak ada satupun kabinet yang dapat bertahan dalam waktu 2 tahun penuh.<sup>29</sup>

Stabilitas politik secara umum dapat dibilang memprihatinkan. Hal ini antara lain diperlihatkan oleh terjadinya konflik politik dalam kuantitas yang amat tinggi. Menurut catatan Hudson dan Taylor, sepanjang 1948-1967 telah terjadi 45 kali demonstrasi-protes, 82 kali kerusuhan, 7.900 kali serangan bersenjata, dan 615.000 orang terbunuh karena sebab kekerasan politik. Secara umum konflik yang bersifat ideologis dan primordial memang mengalami puncak aktualisasinya dalam masa 20 tahun pasca kemerdekaan ini.

Sejak Perpecahan dan reaksi ketegangan situasi politik Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1965. Terjadinya peristiwa pemberontakan PKI yang mengindikasi keterlibatan Presiden Soekarno membuat reaksi politik para ulama yang masih melekat kepada Soekarno mendua dan jauh dari kekerasan anti-komunis yang terjadi dikalangan Partai Islam.<sup>30</sup> Apara aktifis Islam pun dibuat bingung dengan situasi ini. Ada yang tetap mendukung Soekarno sedang yang lain menjadikannya celah untuk kembali aktif dalam dunia perpolitikan Nasional semisal aktifis Masyumi.

### C. Kondisi Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru

Di Indonesia, partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, memberontak kebijakan dan

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta, LkiS, 2009), hlm 65.

mendidik para pemimpin serta mengajar penambahan anggota, baru lahir ketika didirikan Sarikat Islam pada tanggal 10 september 1912 oleh Haji Oemar Sad Tjokroaminoto,<sup>31</sup> yang secara berkesinambungan telah berfungsi di dalam proses mempengaruhi kebijakan dan mendidik para pemimpin serta kemampuan menambah anggota.<sup>32</sup>

Sebelum tahun 1966, partai-partai memegang peran penting dalam menampung impuls-impuls di masyarakat luas. Mereka kemudian berperan pula dalam merumuskan impuls-impuls tadi, dan menggerakkan orang-orang sampat ke RW dan RT berdasarkan rumusan yang mereka buat dan mereka sebarluaskan itu.

Politik dimasa ini boleh dikatakan seperti yang telah terjadi pada tahun 1920-an yang didefinisikan oleh Soekarno sebagai protes *machsvorming* dan *machtsanwending*, yaitu suatu ikhtiar pembentukan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan. Definisi itu memang mengesankan bahwa politik adalah suatu kesibukan mengurus kekuasaan dalam suatu pergulatan, atau persaingan yang menganggkan. Ketika pada penguasa Orde Baru mengukuhkan diri sebagai penentu corak kehidupan di Indonesia sejak tahun 1966, definisi itu dicekam dan diharamkan. Hali ini kemudian muncullah sebuah niat depolitisasi yakni penghapusan kegiatan politik; penghapusan aktivitas politik. Devinisi ini dapat

---

<sup>31</sup> Nur Syam, “Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik Pengalaman Indonesia Orde Baru”, dalam [http://geoties.com/jurnal\\_5.html](http://geoties.com/jurnal_5.html), diakses tanggal 5 januari 2015.

<sup>32</sup> Daniel Dhakide, “Partai Politik dan Kepartaian di Indonesia”, hlm 191.

melalui kebijakan yang nyata seperti kebijakan masa mengambang, hal ini tampak jelas terutama di daerah pedesaan.<sup>33</sup>

Pada masa orde Baru peran serta partai politik semakin dibatasi. Hal ini disebabkan, bahwa untuk memaksimalkan produktivitas teori ekonomi diperlukan upaya untuk memperkecil konflik sosial. Usaha ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk membuat dan menerapkan kebijaksanaan secara cepat, efektif, dan efisien. Berkaitan dengan hal ini bisa dipahami munculnya semacam ideologi yang disebut *pembangunanisme* atau akselerasi modernisasi 25 tahun pada masa itu. Gagasan ini memberikan pbenaran terhadap pembinaan politik yang bebas dari onflik Ideologi dan yang berdasarkan pada pragmatisme, rasionalisme, ketertiban, dan keahlian praktis atau teknokratis.

Dalam konteks politik secara formal, Orde Baru di Indonesia mempunyai ciri-ciri patrimonial, yang hubungan kekuasaannya diatur mengikuti hubungan pribadi antar bapak dan anak buah. Jika diteliti lebih lanjut , maka bentuk pemerintah Orde Baru merupakan peninggalan gaya pemerintahan Jawa-Hindia tradisional, dengan menekankan sosial budaya dari elit yang berkuasa.<sup>34</sup> Dalam struktur patrimonial ini, kekuasaan dan kekayaan dipusatkan pada tangan sekelompok kecil elit penguasa, serta membatasi pembagian hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi kepada pihak lain diluar lingkaran kelompok penguasa. Hak ini dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga “kharisma”

---

<sup>33</sup> Lif Rifqiyah, *Sikap Sarikat Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde baru Tentang Fusi Partai –partai Politik (1971-1977)*: Skripsi Faultas Ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 25.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 36

atau wibawa kekuasaan dan kedudukannya di tangan masyarakat. Hubungan demikian juga diberi istilah sebagai pemerintah yang dijalankan oleh sistem politik birokratis.<sup>35</sup>

Para pendiri Orde Baru adalah kaum militer dan teknokrat serta berbagai unsur yang memang menhendakai suatu kehidupan bernegera yang tidak didera konflik terus menerus, dan tiak direpotkan dengan penyusunan kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Kata-kata yang sering diperdengarkan diawal Orde Baru adalah modernisasi dan sikap yang rasional, juga orientasi program. Hal ini mendorong pemerintah Orde Baru untuk melakukan pemberahan struktural terhadap saluran-saluran peran serta masyarakat. Pemberahan ini terutama bertujuan untuk menyederhanakan struktur dan proses perwakilan kepentingan dengan memperkecil peranan politik kepartaihan mengarahkan peran serta masyarakat pada kegiatan menerapkan kebijaksanaan.<sup>36</sup> Dalam ilmu politik peran serta politik diartikan sebagai peran serta dalam proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah dan dalam proses pelaksanaan kebijaksanaan itu. Para pemimpin Orde Baru pada umumnya lebih menekankan pengertian kedua, yaitu tugas rakyat adalah melaksanakan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.<sup>37</sup>

Secara teoritis kerangka pemikiran yang melandasi Orde Baru atau Demokrasi Pancasila ialah membangun sistem politik Indonesia diatas

---

<sup>35</sup> Dewi Fortuna Anwar, “*Kaabah dan Garuda: Dilema bagi Islam di Indonesia*” Prisma No. 4 April 1984. Th XIII, Jakarta; hlm. 8.

<sup>36</sup> Lif, *Sikap Syarikat Islam*, hlm 37

<sup>37</sup> *Ibid*

keseimbangan yang wajar antara konsensus ada konflik, bukan memberi kebebasan yang berlebihan yang terlibat dalam sistem multi partai zaman demokrasi liberal, atau mematikan konflik sebagaimana yang dilakukan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Pola tingkah laku politik tersebut menunjukkan sikap ekstrim yang membahayakan. Pertama, kecenderungan untuk memiliki kebebasan tanpa batas yang mudah meningkatkan kadar konflik yang tinggi dan berlarut-larut sehingga masyarakat tetap terpecah-pecah dalam kotak-kotak sub nasional dan primodial. Kedua, kecenderungan untuk mematikan sama sekali konflik (kritik atau perbedaan pendapat) yang menjerumus kepada sikap tingkah laku diktatorial.<sup>38</sup>

Itulah secara ide dan teoritis demokrasi Pancasila. Persoalannya sekarang ialah sebagaimana mengusahakan agar tingkah laku politik masyarakat, termasuk pengusaha, bisa mendekati itu. Bagaimanapun juga demokrasi Pancasila yang pada esensinya mengakui bahwa kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat menghendaki agar supaya masyarakat Indonesia yang majemuk itu dapat mengemukakan aspirasi dan keinginan mereka secara jujur murni. Salah satu jalan untuk itu adalah melalui pemilu. Pada hakikatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.<sup>39</sup>

Kenyataan bahwa pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu 1971 tampak sejalan dengan keinginan untuk memberi kesempatan kepada

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*; hlm. 73

masyarakat untuk mengemukakan aspirasi dan kehendak mereka. Meskipun demikian, pemilu tersebut mempunyai batas-batasnya. Diantaranya ialah bahwa hanya 360 dari 460 anggota DPR yang dipilih.

Dalam perdebatan tentang RUU yang mengatur pemilu ini diketahui bahwa keinginan pemerintah untuk menjamin kelangsungan Pancasila dan UUD 1945. Dibalik alasan itu tampak kekhawatiran pemerintah, bahwa jika semuanya dipilih, maka akan sulit untuk mencapai konsensus. Kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya kembali tingkah laku politik yang bebas secara tidak terbatas itu tampak pula membayangi usaha-usaha untuk menjinakkan partai-partai politik, antara lain menghalang-halangi meeka yang dianggap keras atau radikal duduk dalam pimpinannya.<sup>40</sup>

#### **D. Orde Baru dan Latar Belakang Fusi Partai-Partai Politik Islam**

Jatuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, pada kenyataannya telah memberikan corak baru dalam kehidupan politik Indonesia. Jika di masa demokrasi terpimpin tercipta suasana Revolusioner dan Nasakom sebagai legitimasi bagi partai dan aliran politik yang telah dijinakkan oleh Soeharto, maka tema dan gagasan yang menjadi langkah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Semangat pembaharuan yang melandasi Orde baru karena jatuh dan dibubarkannya PKI dapat dianggap sebagai kesempatan bagi dilaksanakannya pembaharuan politik dan sisem kepartaian di Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, hlm 179-180.

<sup>41</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, hlm 75

Meskipun demikian, tidak semua kekuatan politik yang ada terikat terhadap tuntutan pemebaharuan tersebut. Dikalangan Islam, keinginan untuk memadukan peran besar dalam pemerintahan tidak sepenuhnya dapat terwujud. Ide rehabilitasi Masyumi dan pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) hanya menyetujui lahirnya Parmusi yang bertujuan untuk menampung aspirasi umat Islam yang tidak tersalurkan dalam NU, PSII, dan Perti. Penolakan pemerintah Orde Baru menginginkan suatu pemerintahan yang bebas dari persaingan ideologis Orde Lama dan menginginkan suatu pemrubahan politik. Kekuasaan politik pada masa Orde Baru diharapakan tidak lagi berorientasi pada ideologi, tetapi pada program.<sup>42</sup>

Diberlakukannya undang-undang tentang partai politik dan Golkar, berarti telah diekmbangkan kemufakatan dan Golongan Karya, sekaligus sebagai upaya pelembagaan secara formal organisasi-organisasi ini sebagai wadah interaksi politik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui pelembagaan ini, diusahakan suatu kesinambungan struktur kekuasaan yang lazim disebut stabilitas politik, yang dianggap sebagai landasan utama bagi pembangunan sebagai tujuan politik nasional.<sup>43</sup>

Partai-partai yang ada sebelumnya sebagai wujud pelembagaan aktivitas politik dianggap tidak menunjang kelanjutan sistem politik yang ada, dengan kata lain tidak mampu mempertahankan tingkat stabilitas yang diinginkan. Hal ini senantiasa dihubugkan dengan jumlah partai yang terlalu banyak. Akan tetapi,

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Lif. Syarikat Islam*, hlm 43

kenyataannya bahwa gagasan yang diajukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, dengan mengurangi jumlah partai yang pada awalnya berjumlah sembilan partai menjadi hanya dua saja, telah menimbulkan sejumlah masalah baru yang mengoyak eksistensinya.<sup>44</sup>

Fusi (penyederhanaan) didefinisikan sebagai gabungan dari berbagai organisasi atau partai politik yang mengikat diri kedalam satu badan, satu pimpinan dan satu pengelolaan organisasi. Pada umumnya, fusi terjadi apabila beberapa partai kecil berusaha untuk memperkuat perjuangannya agar bisa tercapai.<sup>45</sup> Gagasan dasar tentang penyederhanaan kepartaian dimaksudkan untuk memberikan corak baru pada kehidupan kepartaian di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan baru yang pada dasarnya merupakan ukuran-ukuran bagi hak hidup suatu partai, yakni mengabdi pada pembangunan bansa dan Negara. Penyederhanaan kepartaian dengan jalan pengelompokan-pengelompokan ini bertujuan untuk mengurangi atau melegitimasi fraksi-fraksi ideologis. Sejak februari 1970 langkah-langkah kearah ini telah mulai dijalankan. Tujuan jangka pendek pengelompokan ini adalah untuk mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan,<sup>46</sup> sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah penyederhanaan kepartaian secara konstitusional, yaitu sesuai dengan ketetapan No. XXII/MPRS/1966.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Manuel Kaisiepo, “Dilema Partai Demokrasi di Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas”, dalam: *Analisia Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 305-206.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 306

<sup>46</sup> Cahyono dan Suparlan al Hakim, *Ensiklopedia Politika*, hlm. 124

<sup>47</sup> Pertimbangan yang dimaksud juga mengacu pada UNDANG-UNDANG (UU) Nomor: 7 TAHUN 1953 (7/1953). Adapun Naskah MPRS No. XXII 1960 di atas dilampirkan peneliti

Semangat yang membalut alam pikiran umum pada waktu itu adalah bahwa pembaharuan struktur politik harus dimulai dengan penyederhanaan sistem kepartaian yang ada sebelumnya. Tuntutan terhadap pembaharuan struktur politik dan penyederhanaan sistem kepartaian ini tampak semakin keras bersamaan dengan akumulasi kritik terhadap peranan partai-partai politik yang dianggap telah memperlihatkan perangai buruk dalam sistem politik yang berlaku sebelumnya.<sup>48</sup>

Dalam sejarah kehidupan kepartaian di Indonesia sejak kemerdekaan, paling tidak telah terjadi tiga proses penyederhanaan kepartaian. Pertama setelah pemilu tahun 1955, dari 36 partai menjadi 12 partai. Kedua, pada masa demokrasi terpimpin dibawah presiden Soekarno, dari 12 partai menjadi 10 partai. Ketiga, pada masa Orde Baru yang terdiri dari dua proses yaitu pembubaran PKI tanggal 13 Maret 1966, kemudian disusul dengan pendirian Parmusi dan Golongan Karya dan sesudah pemilu tahun 1971, dari sepuluh partai menjadi tiga.<sup>49</sup>

Menurut pemerintah Orde Baru ketidakstabilan politik yang terjadi sebelumnya disebabkan kesalahan sistem kepartaian Orde Lama. Hal ini menjadi alasan utama Orde Baru untuk melaksanakan fusi partai-partai politik, ditambah lagi munculnya peta kekuatan politik yang sama sekali baru pada masa itu, yaitu kemengan Golkar pada pemilu 1971 yang didukung oleh pemerintah. Walaupun masing-masing partai politik kurang menyetujui adanya pencutan jumlah partai,

---

<sup>48</sup> Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1974), hlm. 124

<sup>49</sup> Kaisieppo, “Dilema Partai Demokrasi di Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas”, dalam: *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 307

namun tidak ada alternatif lain kecuali menerima fusi. Dari sini sebenarnya sudah bisa diramalkan akan bagaimana nasib masing-masing partai dalam proses integrasi masing-masing kekuatan merasa dirinya punya hegemoni atau supremasi, tidak ada yang lebih di atas yang lain.<sup>50</sup>

Berikut ini proses terjadinya penyempitan parpol sebelum 1971 dan penyempitan parpol pada tahun 1973.



---

<sup>50</sup> Radi, *Strategi PPP 1973-1982*, hlm 5-57

## **BAB III**

### **DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DARI MULTI PARTAI KE ARAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

#### **A. Partai-Partai Politik Islam Masa Awal Orde Baru**

##### **1. Nahdhatul Ulama (NU)**

###### **a. Masa Permulaan Menjadi Partai**

Beberapa waktu sebelum keluar dari Masyumi, KH. A. Wahid Hasyim selaku Ketua Muda PBNU telah banyak melakukan kegiatan prakondisi. Perkembangan politik dalam tubuh Masyumi senantiasa disampaikan kepada para tokoh NU baik di daerah maupun di pusat. Maksudnya agar menentukan sikap. Puncak pra-kondisi itu ditandai dengan berkumpulnya tokoh-tokoh NU se-Jawa dan Madura di kediaman KH. Maksum Khalil, Jagalan-Jombang, awal April 1952. Berbagai persoalan telah dibahas dan akhirnya diputuskan : “ Secara organisatoris NU memisahkan diri dari Masyumi, dan mengusahakan kepada Masyumi agar segera mengadakan re-organisasi untuk menjadikan dirinya sebagai badan federasi. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam keputusan PBNU yang terkenal dengan “Surat Keputusan PBNU tanggal 5/6 April 1952”.<sup>51</sup>

Kemudian pada Muktamar ke-19 di Palembang tanggal 28 April – 1 Mei 1952, keputusan PBNU tersebut disampaikan dalam Muktamar. Ternyata 61 suara

---

<sup>51</sup> Maksoem Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Surabaya, Yayasan Kesejahteraan Ummat, 1982), hlm. 90-91

menyetujui, 9 suara menolak dan 7 suara memisahkan diri dari Masyumi dengan syarat sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan keputusan jangan sampai menimbulkan kegoncangan di kalangan ummat Islam Indonesia,
- b) Pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan melalui perundingan dengan Masyumi, dan
- c) Keputusan ini dijalankan dalam hubungan luas berkenaan dengan keinginan membentuk Dewan Pimpinan Ummat Islam Indonesia yang nilainya lebih tinggi, di mana partai-partai dan organisasi dapat berkumpul dan berjuang bersama-sama.

Selain itu, Muktamar juga membentuk panitia yang terdiri dari 7 cabang, 3 di antaranya cabang yang setuju kepada keputusan PBNU, 3 dari cabang yang kontra (tidak setuju) dan 1 cabang yang blanko. Panitia ini bersama dengan PBNU akan menentukan sikap : Apakah NU akan memproklamasikan menjadi partai politik atau tidak. Dan panitia ini akan bersidang menunggu hasil perundingan NU dengan Masyumi mengenai sikap tersebut.<sup>52</sup>

Ternyata, Masyumi tidak mau mendengarkan niat baik NU. Dan lahirlah Partai Politik NU yang disponsori para Kiai.

Masih dalam Muktamar Palembang NU memutuskan beberapa pokok pikirannya yang erat hubungannya dengan politik :

- a) Mendesak Pemerintahan RI agar segera mengadakan Pemilihan Umum,

---

<sup>52</sup> Haji Abdul Basit Adnan, *Kemelut di NU Antara Kyai dan Politisi*, (Solo, CV. M ayasari, 1980), hlm.18-19

- b) Menyetujui kehendak Pemerintahan RI untuk mengadakan penghematan dan membasmi pengeluaran yang tidak jujur,
- c) Mendesak kepada Pemerintah agar menggiatkan pendidikan Pancasila secara teratur dan bersungguh-sungguh, khususnya tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tampaknya kurang mendapat perhatian.<sup>53</sup>

Dengan demikian, NU sudah membuka lembaran sejarah baru. Jika semula ia hanya menitikberatkan orientasinya kepada soal-sola sosial dan keagamaan, maka semenjak Muktamar Palembang NU menambah orientasi kepada masalah politik. AD-ART pun sudah tidak bernama *Jam'iyyah* lagi, tetapi sudah diubah menjadi AD-ART Partai Politik NU..<sup>54</sup>

Pada masa pertumbuhan, Partai Politik NU menghadapi berbagai kesulitan. Pertama, kekurangan tenaga terampil dibidang politik. Kedua, kesulitan menghadapi lawan politik, dalam arti pertentangan ideologis dengan PKI dan sekutunya. Di samping juga harus “melawan” Masyumi dalam pola pemerintahan koalisi, karena pertentangan harga diri.

Untuk kesulitan pertama, Partai NU segera mengadakan rekrutmen (penambahan anggota) tenaga terampil di bidang politik. Dan tentu saja tenaga terampil harus beragama Islam dan berhaluan dari empat madzab atau menganut paham *Ahlussunah wal Jama'ah*. Selain itu, tenaga terampil ini harus juga memiliki ketaatan kepada para ulama, meski ketaatan itu hanya bersifat formal. Seperti tampilnya H. Djamiluddin Malik yang memprakasai, dan akhirnya NU

---

<sup>53</sup> Ibid hal 93

<sup>54</sup> PB. Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga Partai NU*, 1960

menyetujui berdirinya Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI), yang bertugas memelihara seni budaya muslim, dan berperan mencegah berkembangnya seni budaya yang ditangani kelompok Komunis atau PKI.<sup>55</sup>

Selain itu ada Idham Chalid, yang dikenal sebagai orang yang strategi, kepala dingin, cermat dan teliti dalam berpolitik, pandai bergaul dan bisa hidup disegala zaman dan aktif dalam mengambil bagian di dalam partai NU, dan berhasil menduduki posisi ketua MAa'arif NU pada tahun 1952. Karena potensinya dalam berpolitik sangat menonjol, pada Muktamar ke-21 di Medan, Desember 1956, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.<sup>56</sup>

Dengan segala pertimbangan yang mendalam, setelah NU resmi menjadi partai politik, para anggota NU yang duduk di Parlemen RI segera mengadakan reaksi politik. Delapan anggota fraksi Masyumi (dari NU) secara sukarela membentuk fraksi tersendiri, yakni fraksi NU. Mereka itu adalah KH. Wahab Hasbullah, KH. Muhammad Ilyas, Muhammad Saleh Suryaningprojo, Muhammad Ali Prataningkusumo, A. A. Achsin, Idham Chalid, As. Bamid dan Zainul Arifin (kemudian diganti oleh Saifudin Zuhri).<sup>57</sup>

Kerja keras para pemimpin NU tidaklah sia-sia. Hasil pemilu 1955 menunjukkan, NU berhasil keluar sebagai empat besar setelah Masyumi dan PNI. NU berhasil mendapatkan sebanyak 6.955.141 suara. Sehingga jumlah kursi di Parlemen yang semasa bergabung dengan Masyumi hanya 8 kursi, melonjak

<sup>55</sup> Maksoem Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Surabaya, Yayasan Kesejahteraan Ummat, 1982), hlm. 156

<sup>56</sup> Dr. KH. Idham Chalid, *Mendayung Dan Taufan* , (Jakarta, Endang dan api Islam. 1966), hlm. 134-135.

<sup>57</sup> Saifuddin Zuhri. *Kalaidoskop Politik Iii*, (Jakarta, Gunung Agung, 1981), hlm. 642

menjadi 45 kursi.<sup>58</sup> Keberhasilan NU dalam pemilu ini tentu saja mengubah peta politik Indonesia . di dalam Parlemen, partai-partai Islam telah menduduki 114 kursi dari 257 kursi yang telah diperebutkan. Masyumi mendapat 57, NU 45, PSII 8 dan PERTI 4.<sup>59</sup>

Di dalam Kabinet, dari 25 Menteri yang diperebutkan, 13 diantaranya berhasil diduduki partai-partai Islam. Masyumi 5 orang Menteri, PSII 2 orang Menteri, PERTI seorang Menteri dan NU menduduki 5 orang Menteri. Jabatan menteri yang diduduki oleh NU adalah Wakil Perdana Menteri (KH. Idham Chalid), Menteri Dalam Negeri (Mr.Sunaryo), Menteri Perekonomian (Mr. Burhanuddin Harahap), Menteri Sosial (KH. Fattah Yasin), dan Menteri Agama (KH. M. Ilyas).<sup>60</sup>

### **b. Masa Perjuangan dan Pergolakan( 1955-1968 )**

Setelah proklamasi kemerdekaan, hampir semua organisasi Islam sepakat menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya Partai Politik Islam. Organisasi-organisasi Islam yang pertama kali memperkuat Partai Masyumi adalah : NU, Muhammadiyah, Perserikatan Ulama Islam, Persatuan Umat Islam dan pada tahun berikutnya ditambah oleh organisasi-organisasi lain, seperti : *Al-Irsyad*, *Al-Jamiyyah al-Wasliyah*, dan Pesatuan Islam. Untuk menjadi anggota Masyumi dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu keanggotaan pribadi dan keanggotaan organisasi. Cara keanggotaan inilah yang tidak disetujui oleh Nahdlatul Ulama

---

<sup>58</sup> C.S.T. Kansil, *Inti Pengetahuan Umum* (Jakarta, Pradaya Paramita, 1974), hlm. 73

<sup>59</sup> Saifuddin Zuhri. *Kalaidoskop Politik Iii*, (Jakarta, Gunung Agung, 1981), hlm. 643

<sup>60</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1983), hlm. 34-

karena akan menyebabkan rapuhnya dukungan terhadap Masyumi sebagai satu-satunya wadah politik umat Islam kelak dikemudian hari.

Pada tahun 1949 pimpinan partai Masyumi melakukan reorganisasi dengan mengubah fungsi Majelis Syuro hanya sebagai penasehat. Menanggapi keputusan tersebut, dalam mukhtamar XVIII NU di Jakarta pada 30 April-3 Mei 1950 diputuskan NU akan keluar dari Masyumi sambil menunggu sementara waktu untuk memberikan kesempatan partai Masyumi meninjau pendiriannya atas koreksi-koreksi yang disampaikan NU. Akhirnya, pada muktamar XIX NU di Palembang pada 1 Mei 1952, secara resmi NU menyatakan keluar dari partai Masyumi dan menjadikan dirinya sebagai partai politik.<sup>61</sup>

Ketika demokrasi terpimpin dicanangkan. NU menerima dengan catatan agar tetap menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan atas dasar musyawarah dan mufakat. Demikian juga ketika presiden Soekarno akan menerapkan Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis). Sikap politik NU ini didasari oleh sebuah prinsip bahwa “*dar'u mafaasid muqaddamun ala jalbil mashalih*” (menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat).

Adapun madlarat lebih besar itu berupa :

- a) Tempat yang disediakan bagi NU dapat diduduki anasir lain yang membahayakan.

---

<sup>61</sup> Sejak itu NU memasuki dunia politik secara otonom dan terlibat langsung dalam persoalan-persoalan kekuasaan Negara. Meskipun demikian, NU tidak melepaskan karakteristiknya sebagai organisasi keagamaan dengan tetap mempertahankan struktur kepemimpinan formalnya yang disebut Syuriah dan Tanfidziyah. Lebih lanjut baca *Saifudin Zuhri, Kalidoskop Politik*, hlm 643

- b) Kedudukan partai NU sebagai oposisi yang belum disiapkan, akan bisa merupakan suatu bencana yang tidak diharapkan.

Dengan prinsip ini NU mampu menempatkan dirinya dalam keadaan apapun dan bagaimana langkah yang harus dilakukannya. Setiap tindakan harus diperhitungkan manfaat dan madlaratnya dengan mempertimbangkan keselamatan agama, bangsa dan Negara.

Keadaan semakin bahaya setelah dibubarkannya Kabinet Ali-Roem-Idham dalam bulan Maret 1957,<sup>62</sup> praktis peranan Parlemen dan partai-partai politik menjadi merosot. Pusat kekuasaan yang biasanya berada di Parlemen beralih kepada Presiden Soekarno.<sup>63</sup>.

Dengan segera presiden mengumumkan gagasannya membentuk Dewan Nasional dan membubarkan partai-partai, dengan menerapkan demokrasi terpimpin, memasukkan golongan fungsionalke dalam Parlemen. Langkah pertama yang dilakukan Presiden Soekarno adalah membentuk Kabinet baru. Untuk menghadapi situasi politik seperti itu, NU masih sempat mencoba mengadakan Sidang Pleno NU bersama konsul-konsul NU se-Indonesia pada tanggal 9-10 Maret 1957,<sup>64</sup> yang khusus membicarakan gagasan dari presiden Soekarno yang ingin membentuk Dewan Nasional, pada intinya, akan menyetujui dengan syarat Dewan Nasional hanya bersifat sebagai penasehat dan tidak

---

<sup>62</sup> Kabinet ini sama sekali tidak memasukkan nama-nama perwakilan dari PKI. Soekarno tak kuasa memaksakan keikutsertaan PKI karena mendapat penolakan keras dari empat partai yang lain dalam kabinet. Lihat Idham Cholid, Napak *Tilas Pengabdian Idham Cholid*, hlm 292.

<sup>63</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), hlm 381

<sup>64</sup> Idham Chalid, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), hlm 334

mempunyai akibar politis, dan pembentukannya diselesaikan oleh Kabinet bersama Kepala Negara.

Kemauan Presiden Soekarno segera terwujud pada 9 April 1957. Kabinet ini bernama “Kabinet Karya” dengan Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri, Mr. Hardi, Idham Chalid dan Leimena masing-masing menjadi wakil Perdana Menteri I, II, III. Dari partai NU juga ditunjuk KH. M. Ilyas sebagai Menteri Agama, Mr. Sunaryo sebagai Menteri Agraria, Prof. Drs. Sunaryo sebagai Menteri Perdagangan.

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, pimpinan pemerintah dan Angkatan Bersenjata diletakkan di tangan Presiden.<sup>65</sup> Kekuasaan semakin berpusat ke Istana Negara, ke tangan Presiden Soekarno, fungsi departemen semakin berkurang, khususnya Departemen Hankam (Pertahanan dan Keamanan).<sup>66</sup>

Otonomi Presiden Soekarno semakin mekar dan bahkan menjadi ukuran kehidupan politik dimasa itu. Organisasi sosial politik menjadi lumpuh tidak berdaya. Suhu politik semakin memanas dan sia-sia demokrasi yang paling penghabisan pun lenyap tertelan gelombang Demokrasi terpimpin presiden Soekarno.<sup>67</sup>

Tindakan-tindakan inkonstitusional semakin gencar dilakukan presiden. Antara lain, MPR hasil pemilihan rakyat dibubarkan dan diganti MPRS yang diatur oleh Penetapan Presiden (Penpres) No.2 tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> AH. Nasution, *Kembali Ke Uud 1945*, (Jakarta, 17 Agustus 1976), hlm. 23-24

<sup>66</sup> Adapun bunyi dekrit Presiden dilampirkan.

<sup>67</sup> Idham Chalid, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tnaggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), hlm 354

<sup>68</sup> Bahkan demi kesatuan komando - sesuai dengan prinsip Demokrasi Terpimpin pimpinan rakyat perlu diserahkan secara formal pula kepada Presiden. Pimpinan rakyat itu pun diwujudkan

Anggota MPRS diangkat dan Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pimpinan pemerintah dan Angkatan Bersenjata diletakkan di tengah presiden.<sup>69</sup>

Selanjutnya, pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, oleh DPAS ditetapkan sebagai Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN). Dan untuk memberangus sistem banyak partai, dikeluarkan Penpres No. 7 tahun 1959<sup>70</sup> tentang penyederhanaan kepartaian. Masyumi dan PSI terkena Penpres ini. DPR hasil pilihan rakyat dibubarkan dan diganti DPR-GR yang diatur melalui Penpres No. 4 tahun 1960, ketika di Bandung dilangsungkan Kongres Pemuda Indonesia, pidato presiden di depan Kongres yang terkenal dengan istilah USDEK, oleh DPAS dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari MANIPOL. Maka jadilah MANIPOL-USDEK.<sup>71</sup>

Ide Presiden Soekarno paling penting adalah mempersatukan bangsa Indonesia ke dalam NASKOM (Nasionalisme-Agama-Komunisme). Ide ini terlihat jelas pada amanat Presiden 17 Agustus 1960, yang kemudian terkenal dengan rumusan “Jalannya Revolusi Kita” (JAREK).<sup>72</sup>

Istilah atau rumusan inilah yang kemudian popular dengan sebutan NASKOM JIWAKU. Naskom ini pun diwujudkan di seluruh lembaga Negara baik DPAS, DPR GR, Front Nasional dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

---

dengan membentuk organisasi massa yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dengan demikian, kekuasaan semakin berpusat ke Istana Negara, kewenangan Presiden Soekarno, fungsi diberhentikan oleh presiden sendiri.

<sup>69</sup> Naskah tentang Penpres di atas dilampirkan peneliti

<sup>70</sup> Naskah Penpres di atas dilampirkan oleh peneliti

<sup>71</sup> Idham menceritakan kejadian masa itu bahwa Masyumi dan PSI partai yang menolak kebijakan presiden. Kedua partai tersebut pun pada tahun 1960 dilarang ikut serta alias dibubarkan dengan alasan ikut serta dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Lihat Idham Cholid, *Napak Tilas Pengabdian Idham Cholid*, hlm 366-367.

<sup>72</sup> Ibid hlm 368

<sup>73</sup> Alfia., 40-42

Usaha Presiden menghalangi integrasi ABRI berpusat pada HanKam, yang merupakan langkah awal PKI mengacaukan tubuh ABRI, adalah ketika terjadi pencopotan jabatan KSAD dari Jenderal AH. Nasution pada Juni 1962. Jabatan itu kemudian dipercayakan kepada Jenderal A. Yani yang juga merangkap sebagai kepala Staf Komando Tertinggi di Istana.<sup>74</sup>

Semenjak dr. Subandrio menjabat Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) di tahun 1962, ditambah pula ketika PM Djuanda meninggal dunia di tahun 1963 dan kedudukannya sebagai PM digantikan oleh dr. Subandrio , maka dengan leluasa PKI melancarkan berbagai fitnah. Para intelejensi PKI senantiasa membuat laporan palsu.<sup>75</sup>

Pada pokoknya tindakan PKI dalam rangka merealisasikan cita-citanya dapat disimpulkan : (1) Di dalam negeri berusaha keras memecah belah dan menyusup ke dalam kekuatan lawan; (2) Di luar Negeri berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas aktif menjadi condong ke kiri, ke blok komunis.<sup>76</sup>

Usaha mengacaukan situasi ini dilakukan PKI secara leluasa di segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi maupun militer.

Di atas merupakan sketsa kasar situasi politik sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa itu seluruh kekuatan politik dibuat tidak berdaya. Yang berperan hanyalah PKI dan ABRI serta presiden Soekarno sebagai pemegang kunci keseimbangan antara kedua kekuatan yang saling berhadapan itu.

---

<sup>74</sup> Suripto, *Bung Karno Hari-Hari Terakhirnya*, (Surabaya, PT. Grip(t.th)), hlm 11-12

<sup>75</sup> Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, Iv (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 107

<sup>76</sup> Idham Cholid, hlm 83

Ketika partai NU mengadakan Muktamar ke-22 pada 14-18 Desember 1959 di Jakarta, Idham Chalid di depan Muktamar perlu menjelaskan bahwa keadaan Negara (kala itu) memerlukan kebijaksanaan dan cara yang banyak berbeda dari keadaan normal sebelumnya.<sup>77</sup>

Digambarkan oleh Idham Cholid, semenjak Dekrit presiden sampai dengan pengesahan kembali para NU pada 14 April 1961, tokoh-tokoh NU sedang mengalami keprihatinan yang mendalam. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan : Apakah NU masih boleh hidup atau tidak? Mereka takut tergilas Penpres No. 7 tahun 1959 dan Penpres No. 13 tahun 1960.<sup>78</sup>

Pada tanggal 15 April 1961, Presiden Soekarno menetapkan keputusannya untuk mengakui 8 partai politik yang berhak hidup, satu diantaranya adalah NU menepati posisi paling besar dilihat dari jumlah anggotanya. Barisan NU terdiri dari Pertanu, Lesbumi, Sarbumsi, Fatayat, Muslimat. IPNU-IPPPNU, PMII dan khususnya Pemuda Ansor dan Bansernya, yang telah siap siaga menghadapi kemungkinan yang paling buruk dari akibat yang ditimbulkan oleh aksi sepihak PKI.

Pada tanggal 6-14 Maret 1965 dilangsungkan KIAA (Konperensi Islam Asia-Afrika) di Bandung. KIAA memilih “*Lajnah Tandzimiyah*” terdiri dari KH.Idham Chalid (presiden dari Indonesia; NU), Dr.Muhammad Huballah (Wapres Mesir), Al Haj Ya’cup (Wapres Nigeria), Syech Abdul Aziz (Wapres Arab Saudi), Prof.Hamid Ahmad Khan (Wapres Pakistan), sekretaris Jenderal

---

<sup>77</sup> H. Anas Thahir, *Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 135

<sup>78</sup> <http://www.masbied.com/nahdhatul-ulama-latar-dan-sejarah-berdirinya-nahdhatul-ulama-nu/>.di unduh pada tanggal 12 Desember 2014.

ditunjukkan HA. Sjaichu (Indonesia; NU). Dan Faladun Dasumamba (Wakil Sekjen; Philipina). Ditambah lagi dengan 2 orang anggota masing-masing dari Iraq dan Thailand. Pada Juli dan Agustus 1965, CGMI dan PR (Pemuda Rakyat) mengadakan latihan rahasia di Lubang Buaya. Ketua IV PBNU, HM.Subchan ZE, yang sejak lama telah menggalang persatuan dikalangan HMI, PMII, Pemuda Ansor, Muhammadiyah, dan lain lain.<sup>79</sup>

Pada periode 1960-1965, NU tampil menjadi kekuatan yang melawan komunisme dalam bentuknya yang berwajah banyak. Hampir di semua sector kehidupan di mana PKI dapat mengembangkan dirinya, NU tampil dengan membentuk beberapa organisasi, seperti : Banser (*Barisan Ansor Serbaguna*) untuk melawan Pemuda Rakyat, Lesbumi (*Lembaga Seni Budaya Muslim*) untuk menandingi Lekra (*Lembaga Kebudayaan Rakyat*), Pertanu (*Persatuan Tani Nahdlatul Ulama*) untuk membendung usaha PKI melalui BTI (*Barisan Tani Indonesia*) di kalangan petani dan nelayan di pedesaan, dan Sarbusumi (*Sarikat Buruh Muslim Indonesia*) untuk menandingi aksi-aksi perburuan SOBSI.

Sikap anti komunis yang dilakukan NU mencapai puncaknya pada saat terjadi Gerakan 30 September 1965. Ketika Dewan Revolusi mengumumkan aksinya pada hari 1 Oktober 1965, siang harinya NU segera mengutuk gerakan yang dikomandani Kolonel Untung dan menuding PKI dan ormas-ormasnya berada dibelakang aksi tersebut. Pada 5 Oktober 1965 NU tampil menjadi kekuatan politik yang pertama menuntut pembubaran PKI. Hari-hari sesuadah itu

---

<sup>79</sup>[http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgibin/content.cgi/artikel/sejarah\\_nahdlatul\\_ulama](http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgibin/content.cgi/artikel/sejarah_nahdlatul_ulama). Diunduh pada tanggal 12 Desember 2014.

NU dan ormasnya secara aktif melakukan usaha-usaha pembersihan terhadap kekuatan Gerakan 30 September (Gestapu).

Sebagai sebuah partai yang banyak andil dalam usaha menciptakan Orde Baru, ternyata NU mengakhiri kharirnya dalam eksekutif dengan tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam kabinet. Tetapi, sekedar menghibur hati, beberapa tokoh NU menanggapi kenyataan itu sebagai sesuatu yang tidak perlu. NU berjuang bukan untuk kedudukan, melainkan demi kepentingan Negara, bangsa dan agama. Dan perjuangan itu dilakukan dengan penuh ikhlas “lillahi ta’ala”. Tetapi kemunduran peranan NU ternyata kurang mampu menghadapi kenyataan yang timbul sesudahnya. Seperti dikemukakan Chalid Mawardi, dalam hal front massa, NU telah memberikan andil besar. Tetapi NU telah lengah di segi lain. Yaitu dalam hal front politik.<sup>80</sup>

### c. Masa Orde Baru ( 1968-1973)

Pengakuan Jenderal Soeharto sebagai Presiden oleh MPRS dalam bulan Maret 1968, menurut Alfian, dapat dipergunakan sebagai ukuran bahwa kaki Orde Baru sudah tertanam kuat. Tetapi Jenderal Soeharto masih dihimpit pada persoalan penting tentang format politik macam apa yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan untuk membangun Indonesia kembali.

Di zaman “Demokrasi Liberal”, stabilitas politik tidak pernah terwujud. Penyebabnya, antara lain, karena sistem banyak partai tidak pernah berhasil membentuk kabinet atau eksekutif yang kuat. Sedangkan di zaman “Demokrasi Terpimpin” kekuasaan Presiden Soekarno sebagai kepala eksekutif sangat besar.

---

<sup>80</sup> <http://mbahduan.blogspot.com.makalah-sejarah-nu.html> Diunduh pada tanggal 12 Desember 2014.

Tetapi kekuasaan itu, ternyata, tidak dapat dipergunakan secara efektif dan baik. Sebab Presiden Soekarno tidak pernah berhasil melaksanakan ide penyederhanaan sistem kepartaian secara berarti, dan yang lebih penting, karena Soekarno tidak memiliki basis masa yang mampu menyangga kedudukannya.<sup>81</sup>

Jenderal A. H. Nasution, mengemukakan, skala prioritas perjuangan Orde Baru adalah: (1) Membangun kembali ekonomi yang sudah parah akibat kesalahan pemerintah Orde Lama, terutama sandang pangan; (2) pengorbanan disegala bidang secara konsekuensi, termasuk pembersih, penertiban mental Orde Lama.<sup>82</sup>

Atas prakarsa Subhan ZE (Ketua IV PBNU), dibentuklah Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP GESTAPU) yang kemudian menjadi Front Pancasila. Gerakan ini bertujuan menyelesaikan krisis politik yang terjadi di Indonesia dan mencapai puncaknya ketika fraksi NU dalam DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) mengajukan resolusi yang meminta dilaksanakan sidang Umum MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Resolusi ini kemudian menjadi usul resolusi DPRGR yang meminta kepada MPRS melakukan sidang istimewa pada Maret 1967. Krisis politikpun berakhir setelah diangkatnya Suharto menjadi pejabat Presiden RI. Peristiwa ini mengawali babak baru pemerintahan Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan “Orde Baru”.

Pada tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru NU memegang peranan cukup besar. Akan tetapi dalam perkembangannya, NU mengalami anti klimaks

---

<sup>81</sup> AH. Nasution, *Sejarah Kembali ke UUD 1945*, hal. 38

<sup>82</sup> Andreea, *NU Vis a Vis Negara*, hlm 153

dari seluruh prestasi politiknya. Sampai menjelang pemilu 1971, NU masih memiliki wakilnya di kabinet, tetapi ketika jabatan Menteri Agama beralih ke tangan Prof. Dr. A. Mukti Ali berakhirlah sejarah keikutsertaan NU dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Keterlibatan NU dibidang politik sesudah itu hanya pada sekitar parlemen (legislative), sehingga secara nasional peranannya semakin menyempit.

## **2. PERTI**

### **a. Sejarah Berdirinya PERTI**

Minangkabau merupakan wilayah yang terkenal kuat keterkaitannya pada adat, disamping itu, Minangkabau adalah salah satu daerah yang mengalami proses Islamisasi sangat dalam. Akan tetapi Sulit dipastikan kapan sebenarnya Islam masuk ke daerah ini. Ada yang mengatakan abad ke-8, abad ke-12 dan bahkan ada juga yang memperkirakan abad ke-7 karena menurut almanak tiongkok, sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Sumatera Barat pada tahun 674 M.<sup>83</sup> Terlepas dari berbagai versi yang ada, Hamka mengatakan bahwa raja Islam pertama di Minangkabau (pagaruyung) adalah Raja Alam Arif sekitar tahun 1600 M. Oleh karena pusat kerajaan ini jauh dari daratan, diperkirakan bahwa dengan masuknya raja tersebut, berarti Islam telah menyebar di wilayah Minangkabau sekitar tahun 1600 M tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987), hlm . 111-112, dan lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah. 1960), h. 17-18.

<sup>84</sup> Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*, (Jakarta: Widjaya. 1950), hlm 44.

Sejak Islam masuk ke Minangkabau, telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau yang dipelopori oleh kaum muda. Gerakan itu bertujuan untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sumatera Thawalib yang lebih mengutamakan ilmu-ilmu untuk menggali dan memahami Islam dari sumbernya.

Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Diantara majalah yang mereka terbitkan termasuk Suluh Melaju di Padang (1913), al-Mizan di Maninjau (1918) yang diterbitkan oleh organisasi local Sjarikat al-Ihsan, Al-Mizan, (lain pula) 1928 dan Suarti (Suara Perti) dalam tahun 1940 yang berkenaan dengan soal-soal organisasi.<sup>85</sup> Dalam bidang pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu perkumpulan yang bernama Ittihadul sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan PGAI.<sup>86</sup>

Diilhami oleh perkembangan tersebut, timbullah niat Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, memprakarsai suatu pertemuan besar di Candung Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1928.<sup>87</sup> Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum

---

<sup>85</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1980), hlm. 241.

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1994), hlm. 97.

tua, diantaranya Syekh Abbas al-Qadhi, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI.

Pada tahun 1930, mengingat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah, timbulah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia mengumpulkan kembali ulama-ulama kaum tua di Candung Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930. Pertemuan ini memutuskan untuk membentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Ketika terbentuknya organisasi ini ada 7 Madrasah Tarbiyah Islamiyah kepunyaan kaum Tua yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1930 PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum, yang oleh karena itu tahun 1930 disebut juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Jumlah ulama yang menggabungkan diri dengan PTI cukup banyak.<sup>88</sup>

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konfrensi tanggal 11-16 Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan Tarbiyah Islamiyah berubah menjadi PERTI. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu:

1. Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu.

---

<sup>88</sup> Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madarasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES. 1974), h. 64

2. Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan.
3. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah.
4. Memperkuuh silaturahmi sesama anggota.
5. Memperkuuh dan mempekuat ‘adat nan kawi, syara’ nan lazim” dalam setiap negeri.<sup>89</sup>

**b. Peran Dan Pergerakan PERTI**

Syekh Sulaiman Ar-Rasuly dalam mengembangkan organisasi yang didirikannya mengalami perkembang pesat. Pada tahun 1937, tercatat sebanyak 137 MTI di Minangkabau, dan di beberapa tempat luar Minangkabau. Pada tahun 1938, didirikan pula sebuah madrasah khusus untuk putri, yaitu MTI putri di Bengkawas, Bukittinggi yang dipimpin Ummi Hj. Syamsiah Abbas dimana pada tahun 1940 tercatat memiliki murid sekitar 250 orang. Bahkan pada tahun 1937, misalnya, jumlah murid di MTI Jaho mencapai sekitar 700 orang, kemudian MTI Candung dengan jumlah murid sebanyak 500 orang, dan pada tahun 1938 mencapai 500 orang murid. Diperkirakan pada tahun 1942 sudah terdapat 300 sekolah PERTI dengan 45.000 murid. Sekolah-sekolah tersebut tidak merupakan persatuan yang ketat, diantaranya terdapat perbedaan sifat dan tingkat. Dalam PERTI, termasuk surau kecil maupun surau besar, dimana diajarkan agama pada tingkat tinggi maupun tingkat rendah, semua disebut *Madrasah PERTI*.

Madrasah PERTI menerapkan sistem klasikal, akan tetapi belum memasukkan perubahan isi pendidikan. Pada beberapa surau pengajian Alquran

---

<sup>89</sup> Nelmawarni, dkk, “Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)”, dalam *Sosiohumanika* 16B (1), (Padang: IAIN-IB Press. 2003), hlm. 52

atau pengajian kitab-kitab yang tradisional hanya diselenggarakan menurut sistem klasikal. Namun pada surau yang lain, dimasukkan juga beberapa mata pelajaran dari sekolah *gubernemen*. Sampai tahun 1947 sekolah PERTI, yang memasukkan mata pelajaran umum belum begitu banyak.

Isu yang mengatakan PERTI hanyalah organisasi lokal dan partai kecil, kelihatannya membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Deliar Noer, pada tahun 1945 saja organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir diseluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar pulau Sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan anggota sekitar 400.000 orang. Perkembangan selanjutnya tercatat 350 buah madrasah milik PERTI dari tingkat kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Oleh karena itu perlu dipertegas lagi, tidak mustahil organisasi “ kaum tua ” yang mengklaim dirinya sebagai pengikut *Ahlussunnah Waljama’ah* dan mazhab Syafi’I ini, mempunyai banyak studi yang menarik untuk dikaji.<sup>90</sup>

Selain aktif dibidang pendidikan, organisasi ini juga aktif diluar bidang pendidikan, diantaranya membangun sejumlah masjid dan rumah yatim piatu. Sesudah 1945 PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi).<sup>91</sup>

Pada periode-periode berikutnya, terutama pada masa Ekawibawa Bung Karno, dalam mengikuti gagasan NASAKOM telah menimbulkan pro dan kontra dalam tubuh PERTI. Kemelut yang kurang terbenahi ini kenyataannya sangat merugikan bagi tujuan semula dari organisasi ini. Pengelolaan bidang pendidikan,

---

<sup>90</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1980), hlm. 242.

<sup>91</sup> Ibid

dakwah dan sosial seolah-olah terabaikan kalau tidak dapat dikatakan terlupakan sama sekali. Oleh karena itu, pada tahun 1969 Syekh Sulaiman Ar-Rasuly pendiri organisasi ini satu-satunya yang masih hidup pada waktu itu, mendekritkan agar kembali kepada *khittah* semula, yaitu status non-politik. Dekrit sesepuhnya itu hanya di diterima oleh sebagian saja, yang dipimpin Baharuddin Ar-Rasuly yang kemudian menyalurkan aspirasi politiknya bergabung dengan GOLKAR. Adapun sebagian lagi yang tidak menerima dekrit tersebut tetap sebagai anggota partai politik dan ikut dalam pemilihan umum 1971.

Pada masa pasca Orde Baru, untuk menjaga independensi organisasi agar tidak berpolitik praktis, maka pada Munas ke IV Tarbiyah tahun 1999 di Hotel Jaya Raya Cisarua Puncak. Organisasi ini mengambil sebuah keputusan yang penting yaitu “untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai politik apapun”. Dalam hal ini Tarbiyah di deklarasikan sebagai organisasi masa keagamaan yang independen.<sup>92</sup>

Walaupun Tarbiyah menyatakan independen dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, tetapi kondisi ini tidak ditunjukkan oleh elite-elite Tarbiyah yang masih terlibat dalam partai politik. Elite-elite Tarbiyah pada pasca Orde Baru masih mendapat fasilitas untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Mereka yang terlibat dalam partai politik secara tidak langsung telah menarik masa Tarbiyah untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke Partai Golkar. Di sisi lain elite-elite yang berada di luar partai politik (elite non partisan) seperti akademisi dan birokrat juga memiliki

---

<sup>92</sup> *Ibid*

kepentingan untuk menjaga eksistensi organisasi ini agar jauh dari kepentingan-kepentingan politik.

Dengan posisi yang semacam ini, orang akan jadi paham akan apa yang terjadi di kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah setelah berkiprah di dunia politik. Garapannya yang bercabang dua; pendidikan keagamaan dan politik kenegaraan, adalah lahan yang jelas menuntut dinamisasi dan penalaran intelektual dengan segala macam sistemnya. Artinya, para tokoh Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang memiliki kemampuan intelektual, punya dua wajah fundamental garapan penalarannya. Hanya, karena telah mengambil kata sepakat untuk tidak membicarakan nilai-nilai keagamaan, ibadah dan akidah yang sudah menjadi amalan banyak orang, mereka menjadi segan untuk menggarap lahan itu. Lalu, sebagai manusia, dan apalagi sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi intelektual dan butuh penyalurannya, disengaja atau tidak, potensi nalar itu teralirkan ke potensi kedua, dunia politik dengan segala macam tipu daya.<sup>93</sup>

Namun keterlibatan elite-elite Tarbiyah dalam politik, tidak begitu saja mudah diterima oleh elite-elite Tarbiyah lainnya yang berasal dari akademisi. Mereka memandang beragam persoalan keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik lokal di Kota Padang. Pandangan pertama adalah keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik tidak membawa dampak apa-apa terhadap Tarbiyah secara kelembagaan. Mereka yang masuk partai politik hanya membawa misi pribadi tanpa mencoba memberikan sumbangan fikiran dan materi untuk perkembangan lembaga kedepan. Kondisi tersebut hanya menyeret Tarbiyah

---

<sup>93</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006) hlm. 128- 135

dalam pergolakan politik semata, sehingga inti dari misi lembaga yaitu pendidikan, sosial dan dakwah sering terabaikan.

### **3. Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII)**

#### **a. Tjokroaminoto Sang Pelopor PSII**

Tjokroaminoto adalah seseorang yang di Surabaya ia mulai aktif berorganisasi dan menjadi ketua perkumpulan Panti Harsoyo sebelum masuk Sarekat Islam (selanjutnya disebut SI) yang berada dibawah pimpinan H. Samanhoedi. Melalui H. Hasan Ali Surati, seorang saudagar kaya dari India yang menjadi ketua Perkumpulan Manikem, Tjokroaminoto diperkenalkan dengan empat pengurus SI yang sedang menjajaki pembukaan cabang disana. Sejak itulah Tjokroaminoto menunjukkan ketertarikannya dan resmi menjadi anggota SI untuk kemudian menjadi ketua cabang di Surabaya. Oleh Tjokroaminoto, SI menjadi organisasi pergerakan pertama yang berskala nasional (bukan Boedi Oetomo seperti yang dikenal oleh masyarakat awam dewasa ini) yang mampu mengadakan mobilisasi massa dalam sebuah *vergadering* (rapat terbuka) yang diadakan pada 26 Januari 1913 di Surabaya. Rapat terbuka tersebut dihadiri 12 *afdeling* (cabang) dari 15 *afdeling* yang ada dan berhasil menyedot atensi massa sebanyak 80.000 orang. Namun, menurut Schippers 64.000 peserta rapat di Surabaya ini berasal dari Surakarta. Selanjutnya, pada kongres pertama yang diadakan di Surakarta

pada 23 Maret 1913 yang diikuti oleh 48 afdeling Tjokroaminoto ditunjuk sebagai wakil ketua SI dan redaktur pelaksana Oetoesan Hindia.<sup>94</sup>

Pada Kongres Kedua SI yang diadakan di Yogyakarta, April 1914, merupakan momen yang sangat bersejarah bagi Tjokroaminoto, SI, dan bagi rakyat Indonesia saat itu dimana Tjokroaminoto menjadi pemimpin tertinggi SI menggantikan H. Samanhoedi. Kongres kedua tersebut dihadiri 147 delegasi yang mewakili 440.000 anggota. Pada pembukaan kongres tersebut permintaan Samanhoedi agar tidak ada perubahan kepengurusan ditolak oleh peserta kongres. Mereka menginginkan Samanhoedi untuk menyerahkan kepengurusan kepada generasi muda yang lebih pandai dan memiliki kapasitas. Untuk meredakan suasana dan memberikan apresiasi kepada H. Samanhoedi, Hasan Djajadiningrat mengusulkan agar Samanhoedi ditetapkan sebagai Ketua Kehormatan CSI (*Central Sarekat Islam*), sebuah posisi tanpa kekuasaan.<sup>95</sup>

Tjokroaminoto yang telah mengonsolidasikan kekuatannya diangkat sebagai ketua. Di Jawa Tengah misalnya, Tjokroaminoto yang sebelumnya wakil ketua SI mulai menandingi Samanhoedi dan turun ke cabang-cabang. Sementara di Jawa Timur, SI jelas berada di bawah kendali Tjokroaminoto. Ia orang yang paling berpengaruh di Surabaya. Ia mengontrol Oetoesan Hindia dan menjadi 'rajanya' *vergadering*. Pada Agustus Tjokroaminoto semakin kuat menancapkan pengaruhnya dengan mengalahkan Hasan Ali Soerati, orang yang mendirikan Setia Oesaha dan toko-tokonya, dan mengambil alih jabatan Soerati sebagai

<sup>94</sup> Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008, hlm.59-61

<sup>95</sup> *Ibid*

direktur Setia Oesaha. Untuk memperluas pengaruh SI di bawah kendalinya, ia mengumpulkan kawan-kawannya dan mendistribusikan jabatan pada mereka. Rumah Tjokroaminoto sendiri secara *de facto* menjadi kantor SI surabaya dan kemudian menjadi kantornya CSI.<sup>96</sup>

Selain itu kepiawaian Tjokroaminoto sebagai negosiator ulung tidak perlu diragukan lagi. Melalui lobi-lobinya kepada pemerintah Belanda, SI berhasil memperoleh status hukum dan mengubah *afdeling-afdeling* menjadi SI lokal. Selain itu, SI juga berhasil mendapat ijin untuk membentuk kepengurusan pusat yang kemudian dinamai *Central Sarekat Islam* (CSI). Sampai Kongres kedua sudah 60 *afdeling* yang berhasil diubah menjadi SI lokal dan nantinya terus bertambah. Maka, amat wajar pengaruh Tjokroaminoto semakin besar dan banyak cabang-cabang yang meliriknya untuk menjadi suksesor Samanhoedi.<sup>97</sup>

Di tangan Tjokroaminoto-lah SI mengubah konsep pergerakannya dari pergerakan di bidang ekonomi menjadi organisasi pergerakan nasional yang berorientasi sosial politik dan kepemimpinannya beralih dari kelompok borjuis pribumi ke kaum intelektual yang terdidik secara Barat. Bersama Agus Salim dan Abdul Moeis, Tjokroaminoto saling bahu membahu membesarkan Sarekat Islam hingga menjadi organisasi pergerakan pertama yang 'benar-benar' berskala nasional yang mampu menarik anggota sebanyak 2,5 juta orang. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang daerah ketiga tokoh tersebut yang berbeda-beda.

---

<sup>96</sup> Takashi Shiraisi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Graffiti, 1977)), hlm.73-74

<sup>97</sup> Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, hlm. 73

Tjokroaminoto merupakan keturunan ningrat Jawa, sementara Agus Salim adalah keturunan santri bangsawan di Padang, dan Abdul Moeis juga berasal dari keturunan bangsawan di Padang namun dibesarkan di Palembang. Ketiganya menjadi 'Tiga Serangkai' pejuang muslim yang amat disegani<sup>98</sup>

Bersama Abdul Moeis, Tjokroaminoto duduk sebagai wakil dari Sarekat Islam di *Volksraad* atau 'Dewan Rakyat'. *Volksraad* sendiri dibentuk setelah adanya tuntutan dari SI untuk mengadakan sebuah parlemen. Namun lembaga ini hanyalah bagian dari akal-akalan pemerintah kolonial untuk sekadar formalitas dalam memenuhi program Politik Etis yang saat itu sedang digiatkan. Karena pada saat itu jumlah wakil rakyat pribumi lebih sedikit dari pihak penjajah dan bangsa Timur Asing yaitu hanya sebanyak 25 orang sementara wakil dari Belanda sebanyak 30 orang dan dari Timur Asing sebanyak 5 orang. Sehingga Tjokroaminoto dan Abdul Moeis pada waktu itu memposisikan diri mereka sebagai oposisi.<sup>99</sup> Sedangkan khusus H. Agoes Salim, dia-lah yang memberikan muatan lebih nilai-nilai Islam atau ideologisasi Islam pada SI. Islam-lah yang seharusnya menjadi nilai dan bukan konsep Ratu Adil seperti yang sempat disematkan kepada Tjokroaminoto yang menurutnya berbau animis, mistik dan tidak rasional.<sup>100</sup>

Pada awal kepemimpinannya di SI, Tjokroaminoto cenderung masih bersikap kooperatif dan lunak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam pidato-pidatonya pada Kongres Nasional Pertama SI, tanggal

---

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> *Ibid*

17-24 Juni di Bandung. Dalam pidatonya mengenai *Zelf Bestuur* (pemerintahan sendiri) dan Dewan Rakyat tersebut Tjokroaminoto dianggap belumlah terlalu radikal. Ia masih merupakan 'satria di bawah perlindungan pemerintah'. Nadanya masih berbau seperti yang sering diucapkan kaum etisi. Di pikirannya, Tjokroaminoto belum melihat *Zelf Bestuur* seradikal kemerdekaan, melainkan kebebasan untuk memerintah dan mengurus negerinya sendiri seperti halnya pemerintahan serikat yang tetap bernaung kepada negeri induknya yaitu Belanda.<sup>101</sup> Hal ini dapat dilihat dari kata-katanya "...*bersama-sama pemerintah dan menyokong pemerintah menuju arah yang betul. Tujuan kita adalah mempersatukan Hindia dengan Nederland, dan untuk menjadi rakyat 'Negara Hindia' yang berpemerintahan sendiri.*"

Namun, pernyataannya tersebut juga merupakan sebuah taktik untuk mengamankan penilaian pemerintah pada SI, sambil memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa pribumi bisa memerintah dirinya sendiri. Apa yang dinyatakan Tjokroaminoto jelas sangat menggembirakan kaum liberal di Belanda. Di Hindia, politik asosiasi yang menyatukan negeri Belanda dan Hindia dalam satu ikatan yang lebih sederajat telah berkembang. Mungkin di antara perkumpulan-perkumpulan lain di Hindia, perkumpulan *Theosofi*-lah yang paling jauh mengembangkannya, yang memandang persaudaraan antar manusia yang meliputi semua kepercayaan dan ras.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> *Ibid*

Sikap radikal Tjokroaminoto sendiri tumbuh seiring dengan semakin radikalnya kaum pergerakan pada saat itu. Ada dua hal yang memicu tumbuhnya keradikalan dalam diri Tjokroaminoto:

*Pertama*, penangkapan terhadap dirinya dengan tuduhan keterlibatan dalam kasus SI Seksi B dan peristiwa Garut tahun 1919. SI Seksi B adalah unit dari Sarekat Islam yang bersifat revolusioner dengan orientasinya yang terlihat kejam yaitu membunuh semua orang Eropa dan Cina, dan dengan cara ini mengambil alih pemerintahan. Anggota-anggota dari SI Seksi B inilah yang diduga menimbulkan kerusuhan dalam peristiwa Garut. Tjokroaminoto dianggap telah memberikan persetujuan secara diam-diam terhadap organisasi tersebut namun tidak secara aktif mendorongnya.<sup>103</sup> Walaupun sebenarnya ada indikasi bahwa kerusuhan tersebut merupakan rekayasa yang sebenarnya dibuat oleh residen, kontrolir, bupati, wedana, camat, serta polisi yang masih mempertahankan Tanam Paksa untuk Jawa Barat. Kerusuhan ini sendiri dipicu oleh perintah residen agar menembak Haji Hasan. Tjokroaminoto pun dipermalukan dengan penahanan selama sembilan bulan dan kemudian dibebaskan karena tidak ada bukti-bukti yang kuat. Bahkan pers Belanda dan anggota Volksraad yang radikal pun berpendapat bahwa Tjokroaminoto sama sekali tidak terlibat dalam gerakan SI Seksi B.<sup>104</sup> Akibat dari penahanan ini Tjokroaminoto merasa tidak perlu untuk melanjutkan sikap politiknya yang kooperatifnya kepada pemerintah kolonial.

---

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> *Ibid*

Kedua, pasca dibebaskan pada bulan April, Tjokroaminoto mendapati SI sedang berada di ambang perpecahan. Hal ini tidak lain merupakan ekses dari adanya konflik dengan kubu komunis yang menyusup ke dalam SI hingga memunculkan dua faksi yaitu SI Putih yang diwakili oleh Salim dan SI Merah yang dipunggawai oleh Semaoen. Tjokroaminoto yang awalnya bersikap lebih toleran terhadap orang-orang komunis pada akhirnya memilih untuk bersikap lebih tegas dari sebelumnya.

#### b. Konflik Dalam Perekembangan SI

Tjokroaminoto sendiri pernah terlibat konflik dengan beberapa muridnya tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin dinamisnya dunia pergerakan waktu itu sehingga perbedaan pandangan amat mungkin terjadi. Beberapa muridnya melihat bahwa ide-ide beliau sudah tidak cukup relevan lagi dengan kondisi pada waktu itu. Hal ini berkaitan dengan '*semangat zaman*' ditengah-tengah perjuangan nasional untuk merebut kemerdekaan (terlepas dari masih terbaginya wacana asosianis-penyatuan secara sejajar antara Belanda dengan Hindia yang berpemerintahan sendiri atau pemisahan secara tegas) banyak di antara tokoh-tokoh pergerakan yang tiba pada kesimpulan *kapitalisme*-lah biang keladi terjadinya imperialisme, sehingga mereka mencari landasan ideologis yang sesuai dengan keyakinan perjuangannya masing-masing seperti Alimin dan Moesso yang

menemukannya dalam komunis atau Soekarno yang hampir mirip dengan H. Misbach yang berusaha untuk mensitesiskan Islam dan komunisme.<sup>105</sup>

Alimin-Moesso bersama Semaoen, Darsono, Misbach dan Mas Marco bersiteru dengan Tjokroaminoto yang disokong oleh H. Agus Salim, Abdul Moeis, dan Suryopranoto dalam kasus internal SI Semarang. Alimin-Moesso bersama keempat rekannya tersebut yang mengkooptasi SI Semarang sehingga menimbulkan perpecahan dan menciptakan faksi-faksi dalam tubuh SI, yaitu antara SI Merah dan SI Putih. SI Merah inilah yang nantinya akan bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disebut PKI). Mereka ber-enam inilah yang menjadi kader-kader awal dari Sneevliet, seorang sosialis radikal yang berasal dari Belanda. Ia-lah orang yang mendirikan ISDV, sebuah perkumpulan Marxis pertama di Hindia pada tahun 1914. *Sneevliet* pula orang yang menyebarkan 'virus' sosialis dalam tubuh SI lewat doktrinasinya kepada Alimin-Moesso dkk. Ia dengan jeli melihat SI adalah organisasi rakyat yang memiliki basis massa yang demikian besar, oleh karena itu ia masuk dan menanamkan pengaruhnya dengan membangun blok komunis di tubuh SI<sup>106</sup>

Alimin dan Moesso tentu saja juga adalah 'murid' Tjokrominoto. Sewaktu di Surabaya mereka pernah mondok di rumah Tjokroaminoto dan belajar banyak darinya. Mereka berdua adalah sahabat karib. Alimin sampai tahun 1918, meski telah menjadi anggota ISDV tapi masih dianggap '*anak buahnya*' Tjokroaminoto. Namun saat terjadinya perpecahan dalam tubuh SI ia berpaling pada pihak

<sup>105</sup> Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, hlm.100

<sup>106</sup> Takashi Shiraisi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, hlm.146

komunis. Sementara Moesso adalah seorang individu yang keras dan bertemperamen tinggi. Awal perkenalan dan interaksinya dengan orang-orang komunis banyak dilakukan sewaktu ia dipenjara dengan tuduhan terlibat dalam SI Seksi B. Walaupun demikian Moesso tidak serta merta pro komunis.

Dalam konflik Semaoen-Darsono dengan Agus Salim-Abdul Moeis, ia masih dianggap pro Tjokroaminoto. Namun kemudian ia malah berpihak pada komunis dan pada tahun 1920 bersama Alimin, Semaoen, Darsono, Marco, dan Misbach mendirikan PKI. Moesso-lah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemberontakan PKI 1926/1927 dan kemudian diulanginya pada tahun 1948 di Madiun terhadap pemerintah resmi yang dipimpin Soekarno. Ia kemudian tewas pada peristiwa tersebut.<sup>107</sup>

Peran mereka paling besar dalam konflik antara PKI dengan SI pimpinan Tjokroaminoto adalah dalam pergolakan masyarakat Banten. Mereka berhasil memprovokasi masyarakat Banten dan terutama SI Banten untuk mengganti kedudukan Tjokroaminoto pada tahun 1923. Hal ini dianggap sebagai dampak dari ketidakmampuan SI dalam mengakomodir tantangan radikalisme masyarakat Banten pada waktu itu. Radikalisme masyarakat Banten yang berujung pada pemberontakan itu dengan lihai berhasil ditunggangi oleh PKI. Selain itu, Alimin dan Moesso juga pernah mengusulkan untuk mengubah nama SI menjadi Sarekat Hindia.<sup>27</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*

Menghadapi Alimin-Moesso beserta *kompatriot*-nya di PKI, Tjokroaminoto cenderung bersikap lebih toleran ketimbang dua rekannya yaitu Salim dan Moeis yang lebih keras dalam menanggapi konflik ini apalagi sudah menyangkut prinsip. Bahkan Tjokroaminoto yang sampai dituduh menggelapkan uang CSI malah membalasnya dengan kebaikan pada pihak komunis. Untuk mengakhiri konflik ini, walau sebenarnya hanya bersifat sementara, Tjokroaminoto dan SI-nya sepakat dengan kubu PKI untuk menyusun deklarasi yang dapat mengakomodasi kedua konsep masing-masing pihak yang selama ini bertentangan yaitu antara Islam dan komunisme. Deklarasi ini menyatakan bahwa SI di satu pihak 'mendasarkan diri pada prinsip Islam dan mengakui Islam'. Di lain pihak juga menyatakan bahwa '*SI percaya kejahatan dominasi nasional dan ekonomi itu semata akibat kapitalisme Maka rakyat di koloni ini harus dibebaskan dari kejahatan dan berjuang melawan kapitalisme. Jika dibutuhkan dengan tenaga dan kemampuan terutama oleh persatuan serikat buruh dan tani.*<sup>108</sup>

Namun ternyata setelah itu tetap saja infiltrasi komunis ke tubuh SI semakin kuat hingga mengalami perpecahan. Dan hal itu kemudian menyadarkan Tjokroaminoto untuk kemudian memperkuat basis organisasi. Pada kongres CSI di madiun, pasca dibebaskannya Tjokroaminoto dari penjara, diputuskan untuk selanjutnya meningkatkan kualitas organisasi ke tingkat partai. Pergantian nama menjadi partai dirasakan dapat menciptakan organisasi yang berdisiplin, yang mungkin nuansa tersebut tidak terdapat dalam kata 'Sarekat'. Lagipula ini ditujukan untuk mempersiapkan diri dan merapatkan barisan dalam menghadapi

---

<sup>108</sup> *Ibid*

pemerintah dan PKI, yang dalam hal ini telah lebih dahulu menyebut dirinya partai. Jadi, untuk mempertahankan kepeloporannya dalam dunia pergerakan diubahlah nama Sarekat Islam (SI) menjadi Partai Sarekat Islam (selanjutnya disebut PSI).<sup>109</sup>

PKI sendiri pada akhirnya mengalami kelumpuhan pasca kegagalan mereka dalam pemberontakan yang dilakukan sekitar tahun 1926-1927. Kegagalan tersebut disebabkan pemberontakan terjadi secara terpisah-pisah dan tidak terorganisir. Akibat pemberontakan tersebut pemerintah memiliki alasan yang kuat guna mengambil tindakan tegas yaitu beberapa orang dihukum mati, sekitar 1300 orang ditahan, 4500 orang dipenjarakan dan 1300 orang lainnya dibuang ke Boven digul, Irian Jaya. Alimin dan Moesso sendiri melarikan diri ke Singapura untuk kemudian menyelundup kembali dan menghidupkan kembali sel-sel PKI sekitar tahun 1935.<sup>110</sup>

Selama masa kehancurannya PKI absen dalam dunia pergerakan nasional. Selama itu pulalah selain SI, timbul kekuatan baru dalam pergerakan nasional. Tidak lagi mengusung ideologi Pan Islamisme dan komunisme seperti pendahulunya, tapi nasionalisme yang berusaha melingkupi itu semua. Kali ini yang muncul adalah Soekarno, murid Tjokroaminoto yang paling berbakat. Periode ini nampaknya menjadi periode Soekarno, ia mulai menggantikan Tjokroaminoto dan PKI sebagai bintang pergerakan. Dan Tjokroaminoto tentu

---

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> Hering, *Soekarno Bapak Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm.190

saja adalah bapak asuh, guru, mertua sekaligus '*lawan setanding*' dari tokoh pendiri PNI (Partai Nasional Indonesia) tersebut.<sup>111</sup>

Selama kurun waktu 1905 sampai 1926 adalah tahun-tahun berkembangnya pergerakan kebangsaan. Pada masa-masa ini pula bermunculan ideologi-ideologi yang menjadi dasar bagi perkembangan organisasi-organisasi pergerakan. Cita-cita Pan Islamisme yang dibawa oleh SI ternyata tidak begitu kuat. Demikian pula dengan ide sosialisme jelas mengalami kemunduran dengan hancurnya PKI. Setelah itu muncullah nasionalisme yang berusaha membedakan dirinya dengan paham-paham yang didasarkan atas agama dan sosialisme. Paham ini didasarkan atas keinginannya untuk mencapai emansipasi politik dengan kekuatan sendiri, mengkampanyekan persatuan Indonesia, memperjuangkan kesadaran nasional serta berusaha melepaskan Hindia dari dominasi imperialisme dan kapitalisme Belanda. Gerakan ini di Belanda tumbuh di *Indische Vereeniging* (IV) yang merupakan pendahulu dari Perhimpunan Indonesia (PI) dan di Indonesia berkembang di Perserikatan kemudian Partai Nasional Indonesia (selanjutnya disebut PNI). Yang pertama dipimpin oleh Hatta dan yang kedua tentu saja Soekarno.<sup>112</sup>

PSI sendiri dengan arus kebangkitan ideologi nasionalisme revolusioner yang berpusat disekeliling Soekarno, awalnya memperlihatkan sikap kerja sama. Persatuan ke arah kerja sama antara kelompok Islam dan nasionalis telah

---

<sup>111</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm.278

<sup>112</sup> John Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia, Tahun 1927-1934*,

ditempuh Tjokroaminoto. Soekarno dan Tjokroaminoto mencapai kesepakatan untuk menggagas front bersama yang membedakan 'kaum sana' (penjajah) dengan 'kaum sini' (terjajah). Yang kemudian direalisasikan dalam bentuk sebuah federasi yang dikerjakan oleh Soekiman Wirjosandjoyo.

Setelah melewati beberapa kali rapat diantara kedua pihak maka pada tanggal 17 Desember dibentuklah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (selanjutnya disebut PPPKI). Federasi ini menghimpun 7 organisasi politik terkemuka baik dari kooperasi maupun non-kooperasi. Organisasi ini terdiri dari PNI, PSI, Boedi Oetomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club, dan tiga organisasi bergabung kemudian yaitu Sarekat Madura, Perserikatan Brebes, dan Tirtajasa Banten.<sup>113</sup>

Perkembangan selanjutnya mulai menunjukkan indikasi ketidakharmonisan diantara dua organisasi tersebut. Ditandai dengan kebangkitan ideologi nasionalisme sekuler. *Ernest Renant*-lah yang menjadi sumber inspirasi bagi kaum nasionalis ini. Jalan pikiran tokoh-tokoh nasionalis berangkat dari *tesis Renant* mengenai bangsa sebagai '*Le desire d'etre ensemble*' atau keinginan untuk bersatu. Namun, Soekarno tidak berhenti sampai disitu. Ia mulai mengungkit-ungkit tentang bumi Indonesia yang dianalogikannya sebagai '*ibu Indonesia*'. Ia mengajak memperhambakan dan membudakkan diri pada '*ibu Indonesia*' dan memberikan kesetiaan yang tertinggi kepadanya. Pemikiran Soekarno ini mengoreksi pendapat-pendapat yang mengatakan nasionalisme bisa didasarkan

---

<sup>113</sup> *Ibid*

atas kesukuan (kaum nasionalis Jawa) atau agama. Dalam hal ini Soekarno jelas memposisikan negara seharusnya dipisahkan dari agama agar negara nasional dapat tercapai.<sup>114</sup>

Golongan nasionalis terus menyerang PSI yang mengusung ideologi Islam. Mereka bahkan mulai mengkritisi tentang hal-hal yang menurut umat Islam adalah sesuatu yang sakral. Misalnya saja dalam hal poligami. Golongan nasionalis memandang poligami sebagai bentuk merendahkan perempuan, tidak sesuai dengan zaman dan sudah usang. Dalam kongres Pemuda Indonesia kedua pada 24-28 Desember 1928 di Jakarta, Soekarno berpidato tentang emansipasi dan peranan perempuan dalam perjuangan nasional. Ia mengatakan gerakan-gerakan feminis di Asia jauh tertinggal dibandingkan di negeri-negeri Barat.<sup>115</sup>

Golongan nasionalis semakin agresif dalam mengembangkan gagasannya. Soekarno semakin sering mengutip tokoh-tokoh pergerakan nasional di Asia dan mulai mengembangkan watak nasionalismenya yang anti Barat. Ia menyindir *Pan Islamisme*-nya PSI yang dikesankannya mengharapkan dukungan dari luar. Soekarno berpendapat bahwa ide tersebut haruslah dilaksanakan dengan kemandirian sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun yang menentang tujuan Indonesia merdeka.<sup>116</sup>

Sementara itu, imbas dari ketegangan ini juga merembet sampai PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).

---

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, hlm.217

Tjokroaminoto dan Salim dituduh ingin menguasai PPPKI dan disebut sebagai '*pengkhianat*'. Maka kalau sampai usaha mereka ini berhasil maka pergerakan nasional yang sedang dibangun akan hancur.<sup>117</sup>

Tjokroaminoto yang pada awalnya terlihat diam mulai bangkit dan menyerang balik kelompok nasionalis yang dimotori oleh muridnya, Soekarno. Ia menyadari kini PSI telah mundur dibandingkan masa-masa sebelumnya dan sekarang poularitasnya sedang digantikan oleh PNI. Di rapat internal PSI, Tjokroaminoto menuduh di antara organisasi-organisasi lainnya, PNI-lah organisasi yang paling berbahaya dan berusaha menghancurkan PSI. PNI telah berusaha menarik para anggotanya dan karena itu Tjokroaminoto meminta anggotanya tidak meninggalkan PSI, apalagi memasuki organisasi yang tidak berazaskan Islam.<sup>118</sup>

Kemudian PSI demi untuk mengakomodir dan menjaga agar nasionalisme dan cinta tanah air tidak hanya diidentikkan dengan kaum nasionalisme sekuler, pada Kongres Nasional yang ke XIV di Jakarta pada Januari 1929 memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (selanjutnya disebut PSII), walaupun warna Islamnya tetap dominan.<sup>119</sup>

Kemudian di PPPKI, PSII mulai menunjukkan sikap tidak percaya terhadap kredibilitas federasi tersebut. Dalam Kongres Nasional XV di Yogyakarta pada 24-27 Januari 1930, Soekiman yang merupakan penggas PPPKI mengaku

---

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> *Ibid*

kecewa dengan federasi tersebut dan pemimpinnya dari golongan nasionalis, karena itu ia meminta PSII untuk keluar saja dari PPPKI. Awalnya keinginan Soekiman ini kontras dengan pendapat Tjokroaminoto yang berusaha tetap meyakinkan kegunaan PPPKI tersebut. Namun, Tjokroaminoto yang melihat kinerja PPPKI semakin buruk ditambah permasalahan krusial yang sudah sejak lama yaitu Anggaran Dasar PPPKI yang menyatakan hanya menerima anggota yang berkebangsaan Indonesia saja dan tentu saja hal ini bertentangan dengan azas PSII yang tidak hanya mendasarkan diri pada kebangsaan belaka tapi persaudaraan Islam tanpa dibatasi rasa kebangsaan. Maka pada akhirnya diambil keputusan untuk mundur dari PPPKI oleh pimpinan PSII pada 28 Desember.<sup>120</sup>

Pada masa selanjutnya, yaitu masa orde baru Pada sekitar bulan Desember tahun 1972, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengadakan Majelis Tahkim (MT) ke 33 di Majalaya, Jawa Barat, selain membuat program kerja partai, partai ini juga akan memilih pengurus Lajnah Tanfidziyah (LT) yang baru sesuai dengan AD/ART PSII.

Partai berlambang kalimat Tauhid dan nama Allah SWT dan Rasulullah SAW ini, secara demokratis mengadakan pemilihan langsung untuk jabatan Presiden Lajnah Tanfidziyah PSII dan Presiden Dewan Partai PSII, yang kemudian dari hasil pemilihan yang langsung dan jujur itu, terpilihlah salah seorang kader PSII yang masih muda dan memiliki bakat orator yang bagus serta penampilan fisik yang berwibawa sebagai Presiden LT PSII (eksekutif), yakni M

---

<sup>120</sup> *Ibid*

Chasan Ibrahim, serta pakar hukum Bustamam sebagai Presiden Dewan Pusat (DP) PSII.

Kepengurusan tersebut dilengkapi dengan beberapa kader PSII di antaranya duduk beberapa kader PSII yang duduk di DPR RI, antara lain Ny Zubaedah Muchtar (ibunda Valina Singka), Yusuf Helmi, Wartomo Dwijoyuwono, dan banyak lagi kader-kader terbaik di Syarikat Islam. Namun kepengurusan tersebut diisukan, orang-orang yang duduk sebagai pimpinan PSII tersebut mantan kader Masyumi.

Namun belum sampai tiga bulan, kepengurusan PSII hasil MT 33 Majalaya dikup oleh sejumlah anak-anak muda yang mengaku dari beberapa ormas dibawah PSII, seperti Syarifuddin Harahap (Pemuda Muslim), Ahmad Mojo (SEPMI/Serikar Pelajar Muslim), dan beberapa pemuda karyawan PT Gobel yang pemiliknya adalah Moh Gobel yang sebelumnya adalah salah seorang Wakil Presiden LT PSII.

Para pemuda tersebut kemudian mendudukkan Ahwar Tjokroaminoto dan Moh Gobel sebagai pimpinan tertinggi PSII. Dan kantor LT PSII di Taman Amir Hamzah Nomor 2, Jakarta Pusat diduduki oleh para pemuda (termasuk para pemuda karyawan Gobel). Agar tidak terjadi konflik fisik, Ibrahim (Presiden PSII MT 33) menahan kemarahan dari sejumlah kader Pemuda Muslim maupun para kader PSII di Jakarta yang masih setia kepada bai'at partai dan tetap mendukung kepemimpinan MT 33 Majalaya.

Pimpinan Pengurus PSII Anwar-Gobel menekan Pengurus PSII hasil MT - 33, Ibrahim- Bustamam agar menyerahkan kepemimpinan PSII kepada Anwar dan Gobel, namun jamaah PSII Ibrahim- Bustamam tetap menolak, sehingga PSII MT 33 yang terpilih secara resmi dan sah sesuai AD/ART pada tahun 1972 tetap eksis sampai hari ini dengan nama SYARIKAT ISLAM INDONESIA (SI INDONESIA)

#### **4. PARMUSI**

Parmusi sebenarnya lanjutan dari Partai Masyumi yang telah dibubarkan oleh pemerintah jaman ore lama. Hal ini dimulai dari akibat pemberontakan PRRI, dengan pusat pemerintahannya di Bukittinggi, mayoritas pemimpin-pemimpin Masyumi dipenjarakan oleh rezim Orde Lama dan Masyumi dibubarkan. Setelah Orde Lama tumbang digantikan dengan Orde Baru, tokoh-tokoh Masyumi yang ditahan dibebaskan antara lain : M. Natsir, Buya HAMKA, Syafrudin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimejo, Muhammad Roem dan lain lain, sejak itu timbulah harapan agar Masyumi direhabilitasi dan diberikan hak hidup kembali.<sup>121</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Masyumi untuk merehabilitasi nama Masyumi anatara lain dengan membentuk suatu badan yang bernama Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) dibentuk pada tanggal 16 Desember 1965. Tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Masyumi maupun oleh pihak lain yang bersimpati kepada Masyumi menemui jalan buntu,

---

<sup>121</sup> Yosrizal Gavar, “Berdirinya Parmusi”, *Buletin Jihad*, vol 13. 2099

begitupun usaha dari tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk menegakkan kembali PII (Partai Islam Indonesia) dihalangi, Bung Hatta yang ingin mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) pun tidak diizinkan karena phobia akan kebangkitan partai Islam menjangkuti pemerintah.

Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) kembali bersidang, para pemimpin Islam tidak menyerah begitu saja, pada sidangnya tanggal 7 Mei 1967 dibentuklah panitia 7 (tujuh) yang diketuai oleh tokoh Muhammadiyah yaitu H. Faqih Usman, setelah melalui beberapa kali pertemuan dan perjuangan yang berat, akhirnya pemerintah memberikan izin untuk mendirikan sebuah parpol baru yang akan menampung aspirasi umat Islam, khususnya bwekas konstituen Masyumi, dengan syarat mantan-mantan pemimpin Masyumi tidak boleh menduduki jabatan yang penting dalam tubuh partai Parmusi.<sup>122</sup>

Parmusi disahkan berdirinya melalui Keputusan Presiden No. 70 tanggal 20 Februari 1968, kemudian diangkatlah sebagai ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan sekretaris umumnya Drs. Lukman Harun, keduanya adalah aktivis Muhammadiyah. Setelah resmi berdiri intervensi pemerintah terhadap partai Parmusi sangat kental aromanya, sewaktu diadakannya kongres partai yang pertama tanggal 4-7 November 1968 yang diadakan di Malang Jatim terpilihlah Muhammad Roem sebagai ketua, Muhammad Roem pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan PM dari partai Masyumi, dalam perjuangan kemerdekaan sebagai Menteri Luar Negeri dan Juru Runding pemerintahan Republik Indonesia beliau terkenal dengan perjanjian Roem-Royen.

---

<sup>122</sup> *Ibid* hlm 2

Reaksi pemerintah langsung datang, dengan tidak merestui Roem sebagai ketua Parmusi, sebagai salah seorang tokoh teras Masyumi, naiknya Roem dikhawatirkan akan membangkitkan Neo Masyumi, melalui sekretaris negara Alamsyah Ratuprawiranegara mengirimkan telegram kilat kepada kongres yang sedang berlangsung, bahwa pemerintah tidak merestui terpilihnya Muhammad Roem sebagai ketua Parmusi. Akhirnya kongres kembali menempatkan Djarnawi Hadikusumo dan Drs. Lukman Harun sebagai ketua dan sekretaris umum Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI).<sup>123</sup>

Kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun berlangsung tidak lama, dikarenakan pemerintah menilai duet kepemimpinan yang berasal dari Muhammadioyah ini dinilai oleh pemerintah tidak kooperatif dengan kepentingan penguasa, terjadilah pemaksaan kehendak disodorkanlah John (Jailani) Naro dan Imron Kadir, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris PARMUSI, akibat dari pemaksaan ini Parmusi mengalami konflik yang tajam dikalangan internal partai.

Akhirnya pemerintah melalui kepresnya No.77/1970 tanggal 20 November 1970, kembali campurtangan dengan menunjuk tokoh Muhammadiyah yang dinilai kooperatif dengan pemerintah yaitu HMS Mintaredja, saat itu menjadi menteri sosial dikabinet Orde Baru. Intervensi dan rekayasa yang dilakukan penguasa membuat Parmusi lemah dan rapuh, sehingga tidak bisa mengembalikan kejayaan Masyumi dahulu. Dalam pemilu tahun 1971, Parmusi hanya dipilih kurang dari tiga juta pemilih atau sekitar 5.36 persen saja.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid* hlm 2

<sup>124</sup> *Ibid* hlm 3

## B. Multi Partai Politik Islam Berfusi Ke Arah PPP

### 1. Fusi Partai Politik Sebelum Pemilu 1971

Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan ketetapan MPRS No. XXII tahun 1966 tentang pembaharuan sistem politik dan penyederhanaan jumlah partai yang ada. Akan tetapi, usaha penyederhanaan kepartaian ini tidak berjalan dengan mudah. Pemerintah Orde baru harus menempuh jalan yang cukup panjang, menciptakan jalur-jalur pengamanan yang konstitusional, agar proses penyederhanaan ini tidak merupakan usaha yang hanya semata-mata kehendak dari atas, tetapi sedikit atau banyak merupakan kehendak yang tumbuh dari bawah.<sup>125</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Soeharto dalam pidatonya dihadapan sidang MPRS pada tangaal 7 febuari 1970 mengimbau agar partai-partai politik menjaga stabilitas nasional untuk menciptakan suasana yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan.<sup>126</sup> Presiden juga mengimbau untuk memikirkan kemungkinan dikelompokkannya partai-partai politik yang ada kedalam kelompok nasionalis atau sekuler dan spiritual, disamping Golongan Karya. Kemudian pada tanggal 27 Februari 1970, presiden menyelenggarakan temu konsultasi dengan para pemimpin partai politik untuk membeicarakan kemungkinan pengelompokan tersebut. Akhirnya disepakati adanya pengelompokan tersebut.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Iif, *Sikap Syarikat Islam*, hlm 63

<sup>126</sup> Perteimbangan Presiden Soeharto kemudian menelaah Keputusan Presiden sebelumnya yaitu Presiden Soekarno. Naskah-naskah Kepres dilampirkan peneliti

<sup>127</sup> Iif, *Sikap Syarikat Islam*, hlm 64

Dari hasil temu konsultasi tersebut, kemudian lahir kelompok nasionalis pada tanggal 9 Maret 1970. Kelompok nasionalis ini adalah gabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Parai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, dan Partai Murba dengan nama kelompok Demokrasi Pembangunan. Pada tanggal 13 Maret 1970 lahir pula kesepakatan menghimpun kelompok spritual, yang merupakan gaungan dari PNI, Parmusi, PSII dan Perti dengan nama kelompok Persatuan Pembangunan.<sup>128</sup>

Bentuk pengelompokan yang disarankan adalah konfederasi dengan susunan organisasi yang terdiri atas sebuah dewan pimpinan dengan ketua umum partai yang berkelompok sebagai anggotanya, didampingi semacam badan pekerja yang berfungsi sebagai brain trust yang memikirkan masalah-masalah konfederasi yang lebih mendetail, dan sebuah sekretariat yang mengurus pekerjaan-pekerjaan administratif.<sup>129</sup> Sehubungan dengan hal ini, pengelompokan “dianggap” sebagai langkah kearah penyederhanaan. PNI antara lain menyatakan bahwa proses ini dalam tradisinya dapat membentuk kerja sama antara partai, kemudian konfedarasi dan baru fusi.<sup>130</sup>

## 2. Fusi Partai-Partai Politik Pada Tahun 1973

Fusi partai sebelum pemilu 1971, bukanlah merupakan fusi yang sebenarnya. Scara organisatoris pengelompokan ini belum berarti menjadikan partai-partai yang bersangkutan sebagai satu kekuatan partai politik, karena

---

<sup>128</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam, cet I.* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1993), hlm. 84-85

<sup>129</sup> *Ibid*; hlm 85

<sup>130</sup> Moertopo, *Strategi Pembangunan nasional*, hlm 194

masing-masing partai politik memiliki hak kepartaian penuh sediri-sendiri dan masing-masing menjadi kontestan dalam pemilu 1971.

Pelaksanaan gagasan penyederhanaan sistem kepartaian lebih lanjut berlangsung stelah pemilu 1971. Proses ini terkait pemilu tersebut, karena pemilu tersebut memunculkan peta kekuatan-kekuatan politik yang sama sekali baru pada saat itu. Partai yang didukung oleh pemerintah, sekber Golkar, telah keluar sebagai pemenang yang jauh melampaui perolehan suara partai-partai politik lainnya. Ide tentang penyederhanaan partai ini akhirnya mengurucut dan membagi partai yang ada menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok spiritual, kelompok nasionalis, dan kelomok karya.<sup>131</sup>

Pemilu tahun 1971 telah mempengaruhi dan mendorong ide penyederhanaan kehidupan kepartaian. Partisipan pemilu telah mengelompokkan dirinya, baik melalui stembus accord maupun karena persamaan program. Sebagai akibat maka pembentukan fraksi di MPR, DPR, dan DPRD mengalami penyederhanaan. Dalam sidang umum MPR tahun 1973 hanya terdapat 5 fraksi yaitu dua fraksi partai politik, utusan daerah, Golongan Karya dan ABRI.<sup>132</sup> Dua fraksi partai politik tersebut adalah fraksi Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan kelompok spiritual dan faksi Demokrasi Pembangunan yang merupakan gabungan dari kelompok nasionalis. Fraksi Persatuan Pembangunan berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 januari 1973 dan fraksi Demokrasi Pembangunan berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada

---

<sup>131</sup> *Ibid*

<sup>132</sup> Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm 172

tanggal 10 februari 1973. Fusi partai-partai politik ini dikokohkan dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang partai politik dan Golongan Karya, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1973. Berdasarkan UU tersebut hanya tiga kekuatan politik yang diakui secara sah hak hidupnya dalam kehidupan politik Indonesia. Ketiga partai politik inilah yang akan mengikuti pemilu-pemilu berikutnya.<sup>133</sup>

### **3. Partai Politik Islam Berfusi Tahun 1973**

Awal mula dari pemakaian gabungan partai politik tidak lepas dari berbagai kritik terhadap multipartai yang sudah dilontarkan sejak tahun 1955, dan penyederhanaan partai-partai pertama dilangsungkan sejak tahun 1960: dari 40 partai lebih menjadi 12, kemudian 10, Masyumi dan PSI dilarang. Di DPRGR partai-partai harus mengelompokkan diri menjadi empat kategori (Nasionalis, Islam, Kristen dan Komunis) berhadapan dengan golongan fungsional Golkar. Setelah 1965, Masyumi dan PSI tidak direhabilitasi, sedangkan PKI dibubarkan pada bulan Maret 1966.

ABRI sebenarnya lebih senang menggantikan partai dengan goongan fungsional. Artinya tidak lagi memberikan tempat bagi ideologi atau agama dalam pengurusan negara. MPRS sendiri juga menyarankan penyederhanaan kehidupan politik pada tahun 1966. Pada bulan agustus, dalam seminarnya yang kedua, Angkatan Darat telah menunjukkan rasa tidak percaya terhadap partai-partai politik dalam ikut menentukan nasib bangsa.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Radi, *Strategi PPP 1973-1982*, hlm 55-56.

<sup>134</sup> Ketidak percayaan ini dirumuskan dalam paparan bahwa fragmentasi dalam kehidupan politik tidak hanya terdapat pada political elite di tingkat saja, akan tetapi dilandasi pula oleh

Penyusunan *pressure group* tidak hanya dilakukan oleh partai-partai besar saja, tetapi juga oleh partai-partai kecil yang gerak-geriknya dibantu oleh political alite yang berada di pemerintahan. Tetapi Angkatan Darat bukanlah satu-satunya yang mempertanyakan kembali sistem multipartai yang tidak dibatasi. Cendikiawan seperti Muhamad Hatta, Umar Khayam, Mochtar Lubis menyalahkan partai-partai terlalu memikirkan kelompok mereka daripada pembangunan nasional.<sup>135</sup>

Tahun 1966 Angkatan Darat menawarkan jalan pemecahan sendiri bagi penyederhanaan dengan membedakan lima kelompok; Golongan Islam, Golongan Kristen-Katolik, Golongan Nasionalis, Golongan Sosial-Pancasila dan Golongan Karya yang tidak berafiliasi. Sebuah rancangan undang-undang kepartaian menyarankan dibentuknya tiga kelompok; nasionalis, agama, dan pancasila-sosialis. Baru pada bulan Mei 1967, Soeharto secara terbuka mengusulkan fusi partai-partai dua bulan setelah ia terpilih sebagai presiden *ad interim*.<sup>136</sup>

Reaksi terhadap usulan itu sangat ramai. Sejak itu Idham Cholid, yang merupakan wakil dari NU dan mayoritas Umat Islam menolak keras bahkan dia menyatakan bahwa partainya boleh bekerja sama dengan partai lain asalkan

---

kekuatan masa sehingga menimbulkan adanya perebutan pengaruh yang tidak sehat dengan penyusunan kekuatan sosial yang berafiliasi dengan partai=partai yang dalam banyak hal sering menjalankan fungsi sebagai berikut; alat untuk mencapai pendidikan formal dalam melaksanakan program politik secara formal dan legal (dalam kabinet maupun lembaga-lembaga pemerintahan yang lain); alat untuk mencapai tujuan politik dalam berbagai bidang sosial politik dan sosial ekonomi (perburuan, tani, budaya, pemuda, mahasiswa). Baca Arif Mudatsir Mandan, Editor dalam buku *Napak Tilas Idham Cholid*, hlm 372.

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 373

<sup>136</sup> Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Benek dan Makna*, (Yogyakarta, LkiS, 2009), hlm 156.

jangan bergabung. Bagi Nu penyederhanaan sistem partai itu mungkin akan membawa keuntungan dalam arti [partai-partai kecil atau terlalu lemah akan tersingkir namun resikonya juga besar, yaitu parati NU bisa di bawah dominasi partai Islam yang lain.<sup>137</sup>

Untuk merespon gagasan mengenai fusi yang sudah semakin menguat dan meluas tersebut, di dalam MPR yang dibentuk pasca Pemilu 1971, Subchan ZE<sup>138</sup> memelopori terbentuknya “Fraksi Persatuan” yang menghimpunfraksi-fraksi partai Islam dan Mejelis. Dua tahun kemudian, tepatnya padawal tahun 1973, perwakilan dari berbagai partai politik Islam berkumpul dan mendeklarasikan PPP yang merupakan singkatan dari Partai Persatuan Pembangunan bukan Partai Persatuan Islam.<sup>139</sup>

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Idham Cholid, *Napak Tilas Idham Cholid*, hlm 374.

<sup>138</sup> Tokoh muda NU yang sangat fokal baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dia adalah rival dari Idham Cholid sendiri di tubuh NU. Pernah menjadi salah satu pimpinan MPR.

<sup>139</sup> Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Benuk dan Makna*, (Yogyakarta, LkiS, 2009), hlm 157.

<sup>140</sup> Mulai 2009 hingga kini PPP memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah<sup>141</sup>;

- 1) KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama (NU) ;
- 2) H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
- 3) Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- 4) Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti;
- 5) Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> [www.Partai Persatuan Pembangunan.html](http://www.Partai Persatuan Pembangunan.html) diunduh pada tanggal 3 Januari 2015 pukul 12.00

<sup>142</sup> Adapun isi naskah deklarasi peneliti lampirkan. Isi naskah tersebut menyebutkan poin-poin kesepakatan gagasan dasar PPP sebagai wadah partai politik Islam yang menaungi semua golongan partai Islam sebelumnya

<sup>143</sup> Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm 233.

Selama Pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru, PPP selalu berada dalam keadaan tertindas. Kader-kader PPP dengan segala alat kekuasaan Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya. Kalau seniman, tokoh PPP itu tidak akan bisa “manggung” di TVRI, satu-satu stasiun televisi yang dikontrol Pemerintah. Hal ini dialami oleh H. Rhoma Irama, Bajuri yang kini dikenal Mat Solar Sopir Bajaj, dan lain-lain. Selama masa Orde Baru banyak kader-kader PPP terutama di daerah yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan.

Dilihat dari sisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, pernyataan “PPP sebagai rumah besar umat Islam” merupakan penegasan bahwa PPP merupakan hasil fusi atau gabungan dari beberapa partai politik Islam melalui sebuah deklarasi bersama pada 5 Januari 1973 (Miladiyah) bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 (Hijriyah). Jadi, kekuatan utama PPP terletak pada kemampuannya untuk membangun dan menggalang kebersamaan di antara partai politik Islam yang melakukan fusi dalam PPP.

Banyak yang berpandangan bahwa PPP hanya didirikan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pandangan itu secara *de jure* dan *de facto* salah besar. Secara *de jure*, AD/ART PPP tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu

sebagai pendiri PPP. AD/ART hanya menyebut bahwa PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik.<sup>144</sup> Ini berarti paratokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART itu yang sejak dulu sampai kini tidak pernah diubah secara substansial menyadari bahwa selain empat partai politik yang berfusi itu, masih ada organisasi Islam yang menjadi pendukung dari keempat partai politik itu yang harus dimasukkan sebagai pendiri PPP.

Masih secara *de jure*, *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP juga tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP, melainkan menyebutnya sebagai pihak yang mendeklarasikan PPP<sup>145</sup>. Deklarasi berasal dari kata *declare* yang berarti mengumumkan, menjelaskan, menyatakan, atau melaporkan. Ini berarti *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP juga menegaskan bahwa pendiri PPP tidak hanya terbatas pada deklarator saja, melainkan di balik itu masih ada organisasi Islam yang turut mendukung deklarasi itu, sehingga deklarasi itu bisa terlaksana dengan baik.

Masih secara *de jure* juga, Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968 yang mengesahkan pendirian Parmusi juga menegaskan bahwa pendiri partai politik ini

<sup>144</sup> Alinea kedua Mukaddimah AD/ART menyatakan: “Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata’ala*, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.”

<sup>145</sup> Dalam *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP dikatakan: “Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan”

adalah 16 organisasi Islam yaitu Muhamamdiyah, Jami'atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathla'u'l Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Wanita Islam. Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, maka pendiri Parmusi secara otomatis juga merupakan pendiri PPP.

Hanya saja karena sebagian besar organisasi Islam pendiri Parmusi itu lebih mengonsentrasi diri pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sementara AD/ART dan *Khitthah* Program Perjuangan PPP berbicara dalam konteks politik, maka wajar jika yang dinyatakan secara eksplisit hanya partai Islam yang telah diakui sebagai partai politik, yaitu Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Pertti.

Ringkasnya, secara *de jure* deklator PPP adalah 4 partai politik. Namun pendiri PPP adalah hampir seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah.

Selain itu secara *de facto*, klaim bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam akan terwujud jika dua puluh organisasi Islam itu yaitu 4 partai politik yang menjadi deklarator serta 16 organisasi Islam yang menjadi pendukung deklarator memberikan mandate kepada PPP untuk menyalurkan aspirasinya. Begitu pula

sebaliknya, jika kedua puluh organisasi Islam itu tidak memberikan dukungan kepada PPP, maka klaim PPP sebagai rumah besar umat Islam hanya pepesan kosong belaka.<sup>146</sup>

Secara *de facto* juga, ketika PPP mendapat dukungan dari dua puluh organisasi Islam itu, PPP berhasil menorehkan sejarah, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Bersama organisasi Islam, PPP menjadi partai politik yang gigih memperjuangkan kepentingan politik umat Islam, dengan segala macam risiko, seperti penahanan, intimidasi, dan bahkan siksaan. Itu semua dilakukan oleh aktivis PPP karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah Allah *Subhanahu Wata'ala* serta sesuai dengan aspirasi umat Islam dan organasisasi Islam.<sup>147</sup>

### C. Pengaruh dan Respon Lahirnya PPP Bagi Umat Islam

#### 1. Terbatasnya Aspirasi Umat Islam

Politisasi birokrasi kenyataannya menyebabkan perkembangan politik di indonesia tidak berjalan dengan baik karena rezim penguasa telah secara tidak adil menempatkan birokrasi sebagai penopang kekuasaannya. Dengan menguatnya peranan politik yang dimainkan, birokrasi akan melemahkan kekuatan dan fungsi partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini ditambah dengan adanya larangan untuk mendirikan cabang bagi PPP di daerah-daerah. Adapun dampak lain secara umum dari

---

<sup>146</sup> Arief Mudatsir Mandan, *PPP Dalam Genggaman Orde Baru*, (Jakarta, Indonesia Satu, 2004), hlm 56

<sup>147</sup> *Ibid*

politisasi birokrasi tersebut adalah bahwa masyarakat terutama yang tinggal di daerah akan tetap termarginalisasikan terhadap berbagai persoalan politik karena ada depolitisasi massa, dan masyarakat hanya mendapat sentuhan politik dari satu pihak saja yaitu partai berkuasa.<sup>148</sup>

Begitu buruknya dampak dari politisasi birokrasi terhadap perkembangan politik di Indonesia, sehingga bila hal ini dipertahankan, akan mendorong terbentuknya pemerintahan yang totaliter, dimana rezim berkuasa tidak dapat dikontrol lagi. Ini artinya, proses pembangunan politik selama ini masih perlu dibenahi kembali..

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh politisasi birokrasi, baik positif maupun negatif. Dampak positif tampak pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan, Sedangkan dampak negatifnya terhadap perkembangan politik sebagai berikut:

- 1) Terciptanya Iklim Politik Yang Tidak Sehat.

Keberpihakan birokrasi kepada salah satu kekuatan politik yang ada merupakan tindakan yang tidak adil dan jelas merugikan pihak lain, karena posisi birokrasi sangat strategis dalam konstelasi politik. Sekali lagi jaringan birokrasi menjangkau setiap wilayah di indonesia melalui perangkat-perangkat yang ada di pusat dan daerah, sehingga praktis hanya Golkar yang dapat mensosialisasikan kebijakan politiknya. Sedangkan partai oposan hanya dapat menempatkan

---

<sup>148</sup> Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm 255.

perwakilan di tingkat daerah, berarti jangkauan sosialisasi politiknya sangat terbatas. Kenyataan inilah yang disebut dengan penciptaan iklim politik yang tidak sehat oleh rezim berkuasa.<sup>149</sup>

Kebijakan politik yang dijalankan Orde Baru bukan saja memperkuat posisi para penguasa dan membuat lemah pihak lain, tapi juga membuka peluang penguasa tersebut melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Akibatnya, selain terampas hak-hak politiknya, rakyat juga tidak punya kesempatan untuk mengembangkan setiap aktivitasnya secara bebas dan merdeka. Sektor-sektor penting ternyata dikuasai oleh penguasa dan para kroninya.<sup>150</sup> Kebijakan depolitisasi masyarakat dan marjinalisasi politik selain membawa beberapa implikasi negatif, pada sisi lain memunculkan kembali peluang bagi kebangkitan kembali kekuatan politik lain termasuk revivalisme politik Islam

## 2) Melemahnya Kekuatan Politik DPR dan Partai Politik

Fungsi birokrasi yang cukup sentral dengan peran gandanya sebagai pelaksana, juga pembuat kebijakan politik politik berimplikasi terhadap melemahnya DPR yang semestinya lebih dominan dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Komposisi keanggotaan Golkar yang mayoritas menyebabkan fungsi DPR hanya sebagai pe-legitimasi berbagai kebijakan yang diusulkan oleh

---

<sup>149</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2000),hlm. vii

<sup>150</sup> Deskripsi diatas selaras dengan aksioma Lord Action sebagaimana yang dikutip oleh M.Din Syamsuddin, yaitu: Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”, (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara ansolut). Lihat dalam M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2000),hlm. ix

birokrasi. Sementara kekuatan politik oleh partai politik semakin melemah, karena penguasa melalui alat birokrasinya seringkali melakukan intervensi ke dalam partai oposan lain, PPP atau pun PDI. Hal itu sangat mungkin terjadi, karena para pejabat birokrasi yang juga kader politik selalu menjaga eksistensi kekuasaan Golkar. Seperti sudah menjadi pendapat umum, rekayasa politik Orde Baru *by design* bertujuan untuk depolitisasi masyarakat melalui penyederhanaan sistem kepartaian, pengembangan konsep massa mengambang, dan format monopolistik dalam kehidupan sosial politik yang diringi melemahnya peran dan fungsi DPR sebagai legislatif.

Sebenarnya sebagai lembaga yang memiliki peran strategis, DPR tetap menjaga integritas kelembagaannya di hadapan pemerintah dan di mata rakyat. Selanjutnya lembaga ini harus memaksimalkan fungsi kontrolnya terhadap pihak eksekutif/ pelaksana birokrasi, tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan tertentu. Anggota DPR yang tidak memiliki reputasi baik dan tidak “integrated” sebagaimana yang dicontohkan di Era Orde Baru, tentu akan merugikan partai pengusungnya dan berdampak buruk terhadap masa depan bangsa dan negara.

### 3) Terhambatnya Partisipasi Politik Umat Islam

Pada masa Orde Baru, rakyat hanya mendapatkan sentuhan politik dari satu arah, yaitu dari rezim berkuasa melalui politisasi birokrasinya. Semestinya sentuhan tersebut juga dapat diterima dari partai politik lain secara berimbang, sehingga kemudian menentukan sendiri pilihan politiknya secara sukarela.

Adanya politisasi birokrasi Orde Baru menimbulkan terjadinya mobilisasi massa yang semakin intens dan terus menerus versus pemerintah.

Umat Islam yang tadinya bebas, sangat antusias terhadap politik dan berpartisipasi aktif dalam birokrasi pemerintah, akhirnya bergeser dan berbalik ketika mereka gabung di PPP.<sup>151</sup> Ini disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak sehat dan tidak mencerminkan sikap politik yang santun dan memberikan sentuhan positif terhadap masyarakat. Langkah-langkah dan kebijakan politiknya hanya menguntungkan partai politik tertentu.

## **2. Respon Aktivis Politik Islam**

Politik yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengusahakan terlaksananya program pemerintah di seluruh wilayah negara agar berfungsi efektif dan fungsional serta tidak diselewengkan, mengharuskan menjadikan birokrasi itu sendiri sebagai penggerak utama program modernisasi dan pembangunan di semua sektor.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam memperbaiki birokrasi itu adalah: pertama, mengalihkan wewenang pemerintah ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi yaitu pemusatkan proses pembuatan kebijakan pemerintahan. Kedua, menjadikan birokrasi efektif dan tanggap terhadap perintah pimpinan pusat. Ketiga, memperluas wewenang pemerintah dan mengendalikan daerah-daerah.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Apalagi ditambah konflik yang sering terjadi dalam tubuh internal PPP sendiri antara tokoh NU, Parmusi, Perti maupun PSI. Mereka sering kali memperebutkan besaran kursi yang PPP di parlemen dan atau kedudukan funsionaris DPP PPP itu sendiri.

<sup>152</sup> M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 18

Selain langkah-langkah yang ditempuh, pemerintah Orde Baru juga menempatkan teknokrat sipil maupun militer yang berorientasi moderen, dapat diawasi dan dikendalikan.

Dengan demikian birokrasi pemerintahan Orde Baru menjadi sangat kuat dan menjadi mesin politik tangguh dalam merekayasa kehidupan sosial politik masyarakat. Yang demikian itu terjadi, karena disamping berfungsi sebagai alat administrasi pemerintahan juga sebagai tempat bertumpunya kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan dan melaksanakan pergantian kepemimpinan yang dikehendaki rezim berkuasa pada saat itu.

Melihat realitas tersebut, dapat dipahami mengapa sebagian generasi pemikir kita pada tahun 70-an memilih gagasan untuk menyiapkan sebuah integrasi politik lewat partisipasi langsung dalam arus utama proses-proses politik dan birokrasi negara, dengan bergabung baik ke dalam Golkar maupun birokrasi negara.<sup>153</sup> Sebagian diantara mereka adalah Berli Halim, Majid Ibrahim, Deliar Noer, Sularso, Bintoro Cokroaminoto, Bustanul Arifin, Saadillah Mursyid, Mar'i Muhammad dan sebagainya, mereka adalah mantan aktivis HMI.<sup>154</sup>

Kemenangan Golkar pada tahun 1971 memberikan kesempatan pihak penguasa untuk menggulirkan ide restrukturisasi partai-partai politik. Langkah

---

<sup>153</sup> Bakhtia Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 260

<sup>154</sup> Respon para aktivis Islam terhadap Partai Islam boleh jadi akibat pengaruh dari gagasan Nurcholis Madjid tentang “Islam Yes, Partai Islam No”. Dari situlah akhirnya para aktivis umat Islam merespon keras baik yang setuju dengan gagasan Nurcholis Madjid tersebut maupun yang menolak dan tidak setuju dengan gagasan tersebut. Lebih lanjut baca Arif Mudatsir Mandan dalam bukunya *Trilogi PPP*.

awal sebagai implementasi gagasan tersebut adalah pengelompokan beberapa partai politik menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, material-spiritual, kelompok yang mengembangkan bidang spiritual, dan juga masih konsern terhadap bidang material. Kedua, bidang spiritual material, kelompok yang mengembangkan bidang material, dan masih juga memberi perhatian terhadap bidang spiritual. Ketiga, kelompok fungsional (Golkar).<sup>155</sup> Secara tidak langsung, NU ketika bergabung ke PPP (1973-1984) juga tak lepas di bawah kendali Orde Baru. Sebagian tokoh Islam lain mengambil sikap kompromis bergabung ke Golkar dan PDI—sebuah sikap politik yang harus dilakukan saat itu.

Berbeda dengan PSII, dua pimpinannya, M.Ch. Ibrahim dan Bustman, SH. Mengeluarkan surat No. 193 tertanggal 18 oktober 1973 menyatakan penolakan partai tersebut terhadap ide tentang fusi partai-partai Islam di bawah bayangan pemerintah Orde Baru. Spontan polemik pun terjadi di kalangan pimpinan partai. M.A. Ghani dan Gobel mengambil alih kepemimpinan partai dan membentuk formasi baru yang makhirnya engaklamasikan Anwar Tjokroaminoto sebagai ketua terpilih. Sejak itu PSII bergabung dengan NU Parmusi dan Perti, dan menerima fusi partai-partai Islam yang dideklarasikan pada tg. 5 januari 1973. Golkar dibiarkan saja berjalan secara natural, karena secara fungsional partai ini adalah tangan kanan pemerintah, dan dengan mudah mengawasi partai-partai Islam yang bergabung dalam satu wadah (receptacle).<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Bakhtia Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998). hlm. 262

<sup>156</sup> Di internal NU sebelumnya muncul sikap menolak ide pemerintah tentang fusi partai-partai Islam dalam Kongres NU di Surabaya tahun 1972. namun kemudian melunak setelah

Mereka melihat tak ada gunanya memperjuangkan Islam politik yang akan membawa resiko besar dengan mempertentangkan Islam dan negara, sebagaimana Islam yang diperjuangkan lewat partai-partai Islam selama Orde Lama. Mereka tetap memperjuangkan berlangsungnya tatanan sosial politik negara sehingga umat islam dapat menjalankan ajaran-ajaran agama mereka secara bebas.

Selain kelompok pemikir sebagaimana telah disebut di atas, sebagian pemikir lebih muda merespon gejala politik birokrasi pada waktu itu dengan sikap yang berbeda. Mereka menganggap persoalan yang lebih urgen adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat Islam, serta membina struktur basis yang diperlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis. Kelompok pemikir yang lebih muda ini juga tertarik dengan kegiatan membangun masyarakat dan bergerak dalam bidang pemikiran dari terjun langsung kedalam percaturan politik atau masuk ke birokrasi.

Sikap kelompok terakhir yaitu memilih berada di luar birokrasi, tampaknya dapat dipahami dan disadari sepenuhnya. Kalaupun mereka berada di dalam birokrasi yang telah dibangun oleh Orde Baru, maka mereka tidak dapat mengaktualisasikan idealisme mereka untuk menata struktur pemerintahan yang demokratis yang dapat menjamin hak-hak politik Umat islam khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Banyak diantara mereka yang justru bergumul dengan masalah-masalah sosial melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan bergabung ke lembaga-lembaga tersebut, mereka merasa dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan masyarakat yang demokratis.

Mengapa mereka tidak memilih aktif di partai yang secara simbolis adalah Islam? Nampaknya penilaian mereka terhadap partai oposan—partai-partai selain Golkar di era Orde Baru, tidak lain hanyalah partai-partai yang berfungsi sebagai ornamental. Mengapa demikian? Jawabannya, karena begitu kuatnya politik birokrasi yang dikendalikan Suharto yang sangat ditakuti. Meskipun kala itu bermunculan partai politik dengan simbol islamnya, kenyataannya tetap berada dalam pasungan penguasa, dan bahkan yang boleh memimpin partai-partai tersebut sebenarnya mereka orang-orang yang dapat dikendalikan penguasa.<sup>157</sup> Partai politik Islam yang sesungguhnya baru muncul belakangan, apalagi ketika dibukanya kran era reformasi pada dekade 90-an.

Para aktivis baru yang masuk kedalam birokrasi Orde Baru meski ada usaha-usaha islamisasi birokrasi, namun komunitas muslim tidak memberikan legitimasi terhadap kegiatan mereka yang dianggap tidak dapat mewakili aspirasi Islam mereka, sehingga islamisasi birokrasi kemudian dimaknai terbalik menjadi birokrasisasi Islam. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa adanya ketidakpercayaan komunitas muslim kepada aktivis baru tersebut. Mereka (aktivis baru) dianggap terlalu akomodatif kepada negara dan bahkan dipandang telah terbawa arus proses-proses politik dan birokrasi negara serta kehilangan sikap kritis mereka. Komunitas pesantren pun dimungkinkan akan kehilangan karakter

---

<sup>157</sup> Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam*. (Jakarta: Paramadina, 1995),hlm. 26

kepesantrenannya ketika berhadapan dengan modernitas, dalam hal ini perkembangan politik dan birokrasi pemerintah. Sudah semestinya mereka harus mengambil sikap bijaksana dengan tetap memelihara prinsip konservasi dan akomodasi, yaitu “al-Muhafazhah ‘ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadidi al-Aslah”.<sup>158</sup>

Namun demikian, proses panjang Islamisasi terhadap birokrasi dan politik pemerintah oleh para pemikir/ aktivis politik Islam memberikan hasil yang berarti terhadap prospek politik Indonesia selanjutnya. Terbukti, tokoh-tokoh Islam tertentu dan bahkan kalangan pesantren memegang peranan penting dalam struktur politik pemerintah pasca Orde Baru, baik sebagai eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Lebih dari itu, wujud konkret partisipasi pemikir/ aktivis Islam dalam kehidupan bangsa dan negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga jalur: legal formal, Islam substantivistik dan Islam transformatif.

Di jalur legal formal, seseorang masuk dan berperan langsung dalam birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/ kenegaraan (real Politics), apakah ia sebagai anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif sekalipun. Masuknya Gus Dur misalnya (Panggilan untuk KH Abdurrahman Wahid) ke dalam struktur politik birokrasi cukup memberi pengaruh besar terhadap dinamika politik di Indonesia, apalagi didukung oleh para intelektual

---

<sup>158</sup> Partai politik Islam adalah partai islam itu sendiri dan partai berbasis dukungan umat Islam, merupakan refleksi kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Partai-partai tersebut antara lain adalah: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Politik Islam Masyumi, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan PNU. Lihat M.DinSyamsuddin, *Etika Agama dalam,hlm. 9*

aktivis muda.<sup>159</sup> Jejak langkah Gus Dur juga diikuti oleh pemikir yang berasal dari organisasi Islam lainnya, seperti Amin Rais, BJ Habibi, M.Din Syamsuddin dan Yusril Ihza Mahendra. Pada jalur kedua, seseorang memutuskan untuk berada jauh di luar birokrasi politik sebagai pemikir atau akademisi di perguruan tinggi, tetapi secara tidak langsung tetap memberikan kontribusi terhadap dinamika politik kenegaraan dan kebijakan pemerintah.

Peran akademisi sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kebijakan politik pemerintah pada batas –batas tertentu agar tetap legitimate dan mendapat trust dari masyarakat.<sup>160</sup> Diantara para akademisi tersebut adalah Harun Nasution, Mukti Ali, dan dikuti oleh intelektual muda saat itu seperti Nurkholis Madjid dan Amin Abdullah. Apapun yang terjadi terhadap politik kenegaraan, maka mereka berusaha tetap konsisten di dunia pendidikan dan pengembangan keilmuan.

Adapun di jalur Islam transformatif, seseorang berusaha melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat juga kegiatan politik tidak langsung dengan perjuangan moral (moral-force) terhadap pemerintah yang sedang berkuasa untuk tujuan –tujuan yang lebih baik, yaitu membentuk masyarakat berperadaban (masyarakat madani). Gagasan yang bernada sosial-transformatif yang diprakarsai kaum intelektual muda bermula dari kelompok kajian dan pelatihan strategis yang relevan. Sebagian mereka juga disebut,”Tradisi Intelektual Kritis”, dimana bersikap kritis terhadap kemapanan sosial-politik

---

<sup>159</sup> Tobroni dan Samsul Arifin, Islam, *Pluralisme Budaya dan Politik*, (Jogyakarta: SIPRESS, 1994), hlm. 63

<sup>160</sup> Rusydi Sulaiman, *Satu Abad Muhammadiyah: Mengembalikan Muhammadiyah Ke Komitmen Awal*, dalam, Syaifullah(Ed.), *Refleksi Satu Abad Muhammadiyah*, (Bengkulu: PWM Press, 2010), hlm. 91

menjadi titik tekan utamanya.<sup>161</sup> Tidak sedikit yang berasal dari kalangan pesantren dan sentra-sentra pendidikan sebagai basis Islam tradisional.

Dalam konteks negara demokratis, keberadaan dan peran positif warga negara, dalam hal ini para pemikir/ aktivis politik Islam akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik kenegaraan semacam Orde Baru dan akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tersebut.



---

<sup>161</sup> Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif,dkk, *Islam and Civil Society: pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm. 133

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab yang lalu dan berdasarkan analisis dari berbagai fakta yang dikemukakan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Orde Baru membuat sebuah kebijakan baru dalam mengatur Partai Politik di Indonesia. Kebijakan ini adalah penyempitan atau penyederhanaan (fusi) beberapa partai politik kedalam tiga golongan yaitu golongan spiritual atau agama, golongan nasionalis dan golongan karya. Keitga golongan tersebut akhirnya terbentuk menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar)
- 2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik gabungan hasil dari aturan fusi oleh Orde Baru yang dideklarasikan oleh tokoh-rotoh partai politik dari empat partai politik Islam sebekumnya, yaitu, Parmusi, Persti, NU dan PSI. Mereka yang mendeklarasikan adalah KH. Dr. Idham Chalid, HMS. Mintaredja, H. Anwar Tjokroaminoto, Rusli Halil dan KH. Masykur.
- 3) Dampak terbentuknya PPP akibat kebijakan fusi Orde Baru bagi umat Islam adalah adanya hegemoni kuat dalam berbagai sektor pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang Golka yang notabene

tangan panjang pemerintahan. Perwakilan umat Islam di legislatif misalnya sulit menyampaikan pendapat ketika semua mayoritas anggota legislatif adalah Golkar. Maka aspirasi umat Islam pun banyak yang terbengkalai.

- 4) Respon negatif justru banyak muncul dari kalangan para aktifis politik dan intelektual Islam. Bagi mereka Islam tidak boleh digunakan sebagai alat untuk berpolitik saja. Adanya PPP justru membuat dikotomi antara politik Islam dan Non Islam makin jauh. Oleh karena itu, mereka membuat gagasan bahwa bagi umat Islam Indonesia tidak wajib memilih partai Islam, karena Islam tidak boleh dijadikan simbol politik belaka. Hal yang terpenting adalah nilai-nilai Islam yang harus diperjuangkan dan itu bisa dilakukan tidak hanya dalam politik yang menamakan dirinya Islam, tetapi partai politik manapun asal memperjuangkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya boleh untuk ikut berpartisipasi.

## B. Saran-Saran

Kajian-kajian mengenai masalah Partai Islam khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih sangat terbatas dalam mengangkatannya, terutama di lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga. Kajian-kajian sejarah yang berhubungan dengan Partai Islam baik yang modern maupun yang tradisional atau sebelum masa reformasi yang berhubungan dengan sosia-politik masih sangatlah mencuat.

Untuk itu dengan skripsi ini diharapkan ada kesinambungan yang berlanjut karena dalam kajian ini masih banyak yang dapat dibahas khusunya yang berkaitan berhubungan dengan politik Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

Abu bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2005.

AH. Nasution, *Kembali Ke Uud 1945*, Jakarta: 1976.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.

Alaidin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, Jakarta: Tarbiyah Press, 2006.

Andree Feillard, *NU Vis-a-vis Negara: pencarian isi, bentuk dan makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Arief Mudatsir Mandan, *PPP Dalam Genggaman Orde Baru*, Jakarta: Indonesia Satu, 2004.

Arif Mudatsir Mandan, *Trilogi Pembaharuan PPP*, Jakarta:

Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Cheppy Hanj Cahyono dan Suparlan al-hakim, *Ensiklopedia Politika*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

C.S.T. Kansil, *Inti Pengetahuan Umum*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1974.

Daniel Dhakide, “Partai Politik dan Kepartaian di Indonesia”, dalam : *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES: 1995.

Deliar R. Noer, *Ideologi, politik dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Penghidmahan, 1983.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES. 1980.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1994

Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2008.

Dudung Abdurrahman, *metode penelitian sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Haji Abdul Basit Adnan, *Kemelut di NU Antara Kyai dan Politisi*, Solo: CV. Mayasari, 1980.

Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*, Jakarta: Widjaya. 1950.

H. Anas Thahir, *Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, Surabaya :PT. Bina Ilmu, 1980.

Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif,dkk, *Islam and Civil Society: pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Hering, *Soekarno Bapak Indonesia Merdeka*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

Idham Chalid, *Mendayung Dan Taufan*, Jakarta: Endang dan api Islam, 1966.

Idham Chalid, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008.

Ichlasul Amal (ed), *Teori Mutakhir Partai Politik* Yogyakarta: Tiara Wacana 1996.

John Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia, Tahun 1927-1934*,

Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madarasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES. 1974.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan: 1997.

Kuntowijoyo, *pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001.

Lif Rifqiyah, *Sikap Sarikat Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde baru Tentang Fusi Partai –partai Politik (1971-1977)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah. 1960.

Manuel Kaisiepo, “*Dilema Partai Demokrasi di Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas*”, dalam: *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Masykur Hasyim, *Menusantarkan Politik Islam: Perjalanan Panjang Partai Persatuan Pembangunan*, Surabaya: Yayasan Sembilan Lima, 2002.

Maksoem Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Ummat, 1982.

Mirian Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001.

M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta:: PT.Logos Wacana Ilmu, 2000.

M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Nelmawarni, dkk, "Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)", dalam *Sosiohumanika* 16B (1), Padang: IAIN-IB Press. 2003.

Prisma No. 4 April 1984. Th XIII, Jakarta

PB. Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga Partai NU*, 1960

Rusydi Sulaiman, *Satu Abad Muhammadiyah: Mengembalikan Muhammadiyah Ke Komitmen Awal*, dalam, Syaifullah(Ed.), *Refleksi Satu Abad Muhammadiyah*, Bengkulu: PWM Press, 2010.

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, 1999.

- Saifuddin Zuhri. *Kalaidoskop Politik III*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008
- Sigit Pamungkas, *Teori Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*, Yogyakarta: institute for Democracy and wellfarism, 2011.
- Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Suripto, *Bung Karno Hari-Hari Terakhirnya*, Surabaya: PT. Grip, tanpa tahun.
- Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia, I*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia*, Jakarta:: Pustaka Firdaus. 1987.
- Takashi Shiraisi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Graffiti, 1977.
- Tobroni dan Samsul Arifin, Islam, *Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
- Umaidi Raidi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta: Integritas Press, 1984.
- <http://www.legalitas.org/>
- <http://geoties.com/jurnal>.

[www.Partai Persatuan Pembangunan.html](http://www.Partai Persatuan Pembangunan.html)

[www.masbied.com/nahdhatul-ulama-latar-belakang-dan-sejarah-berdirinya nahdhatul-ulama-nu/.](http://www.masbied.com/nahdhatul-ulama-latar-belakang-dan-sejarah-berdirinya nahdhatul-ulama-nu/.)

[http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/sejarah\\_nahdlat ul\\_ulama](http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/sejarah_nahdlat ul_ulama)

<http://mbahduan.blogspot.com. makalah-sejarah-nu.html>

[Id.wikipedia.org,](http://Id.wikipedia.org,)

## **Lampiran-Lampiran**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**(Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 Tanggal 22 Juli 1959)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa sebagai lanjutan dari Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 perlu ditetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, yang dibentuk menurut Undang-undang No. 7 tahun 1953, sementara menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat :

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 juncto pasal 19 sampai dengan pasal 21 dan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Juli 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka Dewan Perwakilan Rakyat, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953, menjalankan - tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum mengangkat sumpah (janji) Dewan Perwakilan Rakyat sekarang, tidak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.

(2) Sumpah (janji) yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, berbunyi sebagai berikut :

- a) Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tiada sekalikali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
- b) Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia.
- c) Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

**Pasal 3**

Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 4**

Dewan Perwakilan Rakyat membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

**Pasal 5**

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal

22 Juli 1959.

Presiden Republik  
Indonesia,

**SOEKARNO**

Diundangkan

pada tanggal 22 Juli 1959.

Menteri Muda Kehakiman,

**SAHARDJO.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 1959  
tentang  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UMUM**

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 dengan tegas memerintahkan supaya diselenggarakan dalam waktu yang sesingkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Bentuk yuridis yang dipergunakan untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ialah Penetapan Presiden. Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan in concreto dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959. Tindakan yang dilakukan dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-jawabkan hanya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal 1 ini menegaskan supaya Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan Undangundang tahun 1953 No. 7 menjalankan tugas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

**Pasal 2**

Dalam pasal ini ditetapkan bunyi rumusan sumpah (janji) anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang; sumpah (janji) itu diangkat sebelum memangku jabatan. Selanjutnya ditegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat lama yang tidak mengangkat sumpah (janji), tidaklah lagi menjadikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945.

**Pasal 3**

Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang diatur dengan Peraturan Pemerintah, menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1).

**Pasal 4**

Dewan Perwakilan Rakyat sekarang membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertibnya sendiri. Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat lama disesuaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sendiri dengan Undang-undang Dasar 1945.

**Pasal 5**

Pasal ini menetapkan hari berlakunya Penetapan Presiden ini.

Termasuk Lembaran-Negara No. 76 tahun 1959.

Jakarta, 22 Juli 1959.

Diketahui :

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA NO. 76 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
NO. 1815

TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

**SYARAT-SYARAT DAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN**  
**(Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan keadaan ketatanegaraan di Indonesia, yang menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 dan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, perlu diadakan peraturan tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian:

Memperhatikan :

Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959;

Mendengar :

1. Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 Nopember 1959;
2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Desember 1959;

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Mencabut maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 (Berita Republik Indonesia tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4) mengenai anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

Kedua :

Menetapkan :

Penetapan Presiden tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.

**BAB I**

**ARTI KATA**

**Pasal 1**

"Partai" dalam Penetapan Presiden ini adalah organisasi golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam Negara untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk Negara.

**BAB II**

**SYARAT-SYARAT**

## Pasal 2

Partai harus menerima dan mempertahankan azas dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945.

## Pasal 3

(1) Untuk dapat diakui sebagai partai maka dalam anggaran dasar organisasi harus dicantumkan dengan tegas, bahwa organisasi itu menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dasar-dasar Negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerjanya masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, yang telah dinyatakan menjadi haluan Negara.

(2) Dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai termasuk pada ayat (1) pasal ini harus dicantumkan pula dengan tegas organisasi-organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah partai itu.

## Pasal 4

Dalam memperjuangkan tujuannya, partai-partai diharuskan menggunakan jalan-jalan damai dan demokratis.

## Pasal 5

Partai, harus, mempunyai cabang-cabang yang tersebar paling sedikit disepertiga jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang- cabang itu seluruh wilayah Republik Indonesia.

## Pasal 6

(1) Partai tidak dibolehkan mempunyai seorang asingpun baik dalam pengurus dan pengurus penghormatan maupun sebagai anggota biasa.

(2) Partai tidak diperbolehkan tanpa izin dari Pemerintah menerima bantuan dari fihak asing dan/atau memberi bantuan kepada fihak asing dalam bentuk dan dengan cara apapun juga.

## Pasal 7

Yang berhak menjadi anggota partai ialah warga-negara Indonesia yang telah berumur 18 tahun atau lebih.

**BAB III**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 8**

Presiden berwenang mengawasi dan memerintahkan untuk memeriksa tata-usaha, keuangan dan kekayaan partai-partai.

**BAB IV**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 9**

(1) Presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang:

1. bertentangan dengan azas dan tujuan Negara;
2. programnya bermaksud merombak azas dan tujuan Negara;
3. sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turutserta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggotaanggotanya itu.
4. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini.

(2) Partai yang dibubarkan berdasarkan ayat (1) pasal ini harus dibubarkan dalam waktu selama-lamanya tiga puluh kali dua puluh empat jam, terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden yang dinyatakan pembubaran itu.

**BAB V**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 10**

Presiden menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini.

**BAB VI**  
**ATURAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

Yang dapat diakui sebagai partai pada waktu mulai berlakunya Penetapan Presiden ini ialah partai-partai yang telah berdiri pada waktu Dekrit

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dikeluarkan dan yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini.

**BAB VII**  
**ATURAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember  
1959.

Presiden Republik Indonesia,  
SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1959.

Menteri Muda Kehakiman,  
SAHARDJO.

**PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN NO. 7 TAHUN 1959  
tentang  
SYARAT-SYARAT DAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN  
PENJELASAN UMUM**

Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945, yang menganjurkan berdirinya partai-partai dengan tidak terbatas, ternyata tidak berhasil mencapai stabilitet politik. Ketidak-stabilan dilapangan politik itu mencapai puncaknya pada waktu Konstituante membicarakan Amanat Presiden tertanggal 22 April 1959, yang menganjurkan untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Berhubung dengan keadaan politik seperti diuraikan diatas, yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa dan bangsa pula merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, terpaksalah dikeluarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 yang terkenal. Sejak itu telah tibaah waktunya untuk mencabut Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945 tersebut diatas dan untuk mengatur perkembangan partai-partai sebagai alat demokrasi, sehingga ia dapat berlangsung dalam suasana demokrasi terpimpin.

Dalam mengatur keadaan kepartaian perlu diutamakan penentuan syarat-syarat dan penyederhanaan jumlah partai.

Bentuk yuridis peraturan tentang syarat-syarat dan penyederhaaan kepartaian itu ialah Penetapan Presiden, oleh karena berdasar atas keadaan ketatanegaraan di Indonesia pada waktu ini, yang memaksakan pula dikeluarkannya Dekrit Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 tersebut diatas, dan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawatan Rakyat.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal 1 membuat definisi dari "partai". Menurut definisi itu maka yang dimaksud dengan istilah "partai" dalam Penetapan Presiden ini ialah organisasi

politik dari suatu golongan dari rakyat yang sebagai alat demokrasi memperjuangkan suatu susunan negara dan masyarakat yang tertentu.

#### Pasal 2

Susunan negara dan masyarakat yang diperjuangkan oleh partai-partai termasuk pada pasal 1 tidak boleh bertentangan dengan azas dan tujuan Negara, sebagaimana tercantum dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Untuk mencapai tujuan termasuk pada pasal 2 maka partai harus memenuhi syarat-syarat pokok, yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar Partai dan yang disebut limitatif

dalam pasal 3.

Sebelum syarat-syarat pokok tersebut dapat dimasukkan dalam Anggaran Dasar Partai melalui Kongres Partai, maka pimpinan partai diharuskan menyatakan menyetujui syarat-syarat pokok tersebut dalam sebuah statement.

#### Pasal 4

Ketentuan ini sudah semestinya, mengingat suasana demokrasi terpimpin dibawah Undang-undang Dasar 1945.

#### Pasal 5

Untuk dapat tampil kemuka sebagai "organisasi nasional" maka perlu diadakan ketentuan minimal tentang tersebarnya partai di wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Sebagai organisasi nasional dipandang tidak pantas apabila partai memelihara hubungan-hubungan dengan fihak asing seperti tersebut pada pasal 6. Yang dimaksud ialah hubungan-hubungan baik yang bersifat perseorangan (anggota, pengurus, pengurus kehormatan) maupun yang berwujud bantuan (materiil dan moril). Adalah sesuai pula dengan prinsip demokrasi terpimpin apabila hubungan antara fihak-fihak -nasional dan fihak-fihak asing itu diawasi oleh dan hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah.

#### Pasal 7

Mengingat ketentuan pada pasal 6 maka partai hanya dapat terdiri dari warga-negara Indonesia. Seorang yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dianggap cukup dewasa untuk menjadi anggota partai.

#### Pasal 8

Ketentuan dalam pasal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi terpimpin. Pengawasan ini bersifat repressif dan preventif, dengan pengawasan itu Pemerintah tidak hanya mengambil tindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau yang tercela, tetapi dapat memberi petunjuk-petunjuk pula untuk menyalurkan kehidupan kepartaian kearah yang lebih sehat.

#### Pasal 9

(1) Adalah sebagaimana mestinya, apabila Presiden melarang dan/atau membubarkan partai berdasarkan alasan-alasan tersebut pada pasal 9, untuk kepentingan keselamatan dan keamanan Negara dan masyarakat. Sebelum mengambil keputusan mengenai hal penting seperti tersebut diatas Presiden mendengar dulu pertimbangan Mahkamah Agung, yang untuk itu menguji persoalannya atas dasar-dasar yuridis dan obyektif.

(2) Untuk mengatur segala sesuatu berhubung dengan pembubaran partai, maka kepada pengurusnya perlu diberi waktu yang cukup.

#### Pasal 10

Ketentuan/ketentuan untuk melaksanakan atau mengatur lebih lanjut Penetapan Presiden ini dikeluarkan menurut keperluan dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Keputusan Presiden. Dalam pada itu dapatlah dikeluarkan misalnya suatu Peraturan Presiden tentang Pendaftaran Partai, tentang Pengakuan Partai, tentang Penyelesaian Pembubaran Partai dan lain-lain sebagainya.

#### Pasal 11

Sebagai langkah pertama dalam penertiban keadaan kepartaian, maka partai-partai yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya Penetapan Presiden ini diakui oleh Pemerintah, tetapi partai-partai termasuk sebaiknya harus memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini dan melaporkan segala sesuatu kepada instansi yang akan ditunjuk nanti oleh Pemerintah.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 149 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

## **FRONT NASIONAL**

### **Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan suatu gerakan rakyat, yang bersendikan demokrasi terpimpin, untuk mempersatukan segenap kekuatan progressif dan memimpin gerak masyarakat untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan Undangundang Dasar 1945;

Mengingat: pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 22 Oktober 1959;
2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Desember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Front Nasional.

#### Pasal 1

Nama dan tempat kedudukan Organisasi massa yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden ini dinamakan "Front Nasional" dan bertempat kedudukan di empat kedudukan Pengurus Besarnya.

#### Pasal 2

Tujuan.

Tujuan Front Nasional ialah:

1. menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia;
2. pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;
3. mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Negara

Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Tugas.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional bertugas;

1. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang-bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, keamanan pertahanan;
2. Menyelenggarakan kerja-sama yang seerat-eratnya dengan Pemerintah dan Lembagalembaga Negara lainnya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG**  
**(Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 Tanggal 24 Juni 1960)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai lanjutan dari Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat :

Penetapan-penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Juni 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PENETAPAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT GOTONG-ROYONG.**

Pasal 1

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menyusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, yang menjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong yang dimaksud pada pasal 1 terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan dari golongan-golongan karya dan seorang wakil Irian Barat, yang menyetujui Undang-undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turutserta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Pasal 3

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong yang dimaksud pada pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

#### Pasal 4

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, sebelum memangku jabatan, mengangkat sumpah (janji) dihadapan Presiden menurut agamanya (kepercayaannya)

sebagai berikut :

"Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

#### Pasal 5

Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

#### Pasal 6

Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 7

Kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 8

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong oleh Presiden.

#### Pasal 9

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 1960.

Presiden Republik Indonesia,  
SOEKARNO.

LEMBARAN NEGARA NO. 78 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
NO. 2015  
TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG



**PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NO. 3 TAHUN 1970 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.  
15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN  
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT**

(Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 Tanggal 17 Juli 1970)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum diwilayah Irian Barat sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1970 diperlukan adanya suatu penyesuaian menurut keadaan pada wilayah pelaksanaan Pemilihan Umum

tersebut;

b. bahwa guna memenuhi hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu untuk merubah ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 2914);
3. Undang-undang No. 16 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2915);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 2921).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, untuk daerah Propinsi Irian Barat.

#### Pasal 1

Merubah ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: "Tiap Organisasi dan Kesatuan Masyarakat dapat mengajukan sejumlah calon sebagaimana disebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini".

*TAP MPRS No. I/MPRS/1960*

**K E T E T A P A N**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**

**REPUBLIK INDONESIA**

**No. I/MPRS/1960**

**TENTANG**

**MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA**

**SEBAGAI**

**GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rapat pleno keempat Sidang Pertama pada tanggal 19 Nopember 1960

di Bandung

**Setelah Membahas:**

1. Amanat Negara yang diucapkan oleh Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama Majelis PermusyawaratanRakyat Sementara pada hari Pahlawan 10 Nopember1960;
2. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" dan yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia;
3. Keputusan Dewan Pertimbangan Agung "Perincian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959" tertanggal 25 September 1959 No. 3/Kpts/Sd/II/59, yang telah disetuju oleh Presiden dalam "Kata Pengantar" Manifesto Politik Republik Indonesia pada hari Pahlawan 10 Nopember 1959;
4. Amanat Presiden pada Sidang Pleno pertama Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis, yang menjadi bahagian daripada haluan Negara;
5. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama "Jalannya Revolusi Kita" yang menjadi pedoman pertama daripada pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia;

6. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 yang diucapkan di muka Sidang Umum PBB yang berjudul "To Build the world a new" (Membangun dunia kembali);

**Menimbang :**

bahwa perlu segera ditetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dengan bagian-bagiannya serta pedoman-pedoman pelaksanaannya;

**Mengingat:**

1. Amanat penderitaan rakyat yang tergambar dalam pembukaan UUD 1945;
2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
3. UUD 1945;
  - a. Pasal 1 ayat 2 yang menentukan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".
  - b. Pasal 3 jo pasal IV aturan Peralihan;
  - c. Pasal 2 ayat 3;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959;
5. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960;
6. Bahwa rakyat Indonesia diseluruh kepulauan nusantara Indonesia telah menerima dan mempertahankan Manifesto Politik RI serta perinciannya;

**Mendengar :**

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 17 sampai dengan 19 Nopember 1960;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

Ketetapan tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara sebagai berikut:

**Pasal I**

Memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perinciannya sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.

## **Pasal II**

Amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis pada garis-garis besar daripada haluan pembangunan

## **Pasal III**

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama "Jalannya Revolusi Kita" dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul "To build the world a new" (Membangun dunia kembali) adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

## **Pasal IV**

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusanputusan ini.

### **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA**

Pd. Ketua,

**(CHAIRUL SALEH)**

Wakil Ketua, Wakil Ketua

**(Mr Ali Sastroamidjojo) (K.H. Idham Chalid)**

Wakil Ketua, Wakil Ketua

**(D.N. Aidit) (Kol. Wilujo Puspojudo)**

**❖ Naskah Deklarasi PPP<sup>162</sup>**

**Deklarasi**

Keempat Partai Islam: NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seja sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spirituul/materiil.

Untuk merealisasikan kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.

Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan Presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Februari 1973.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin.

Jakarta, 5 Januari 1973

PRESIDIUM KELOMPOK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ttd,

KH. Dr. Idham Chalid, HMS. Mintaredja, H. Anwar Tjokroaminoto, Rusli Halil,  
KH. Masykur

---

<sup>162</sup> Arif Mudatsir Mandan, *Trilogi Pembaharuan PPP*, (Jakarta, Indonesia Satu, 2005), jilid

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : A. FUAD  
Tempat/tgl. Lahir : Jepara, 02 September 1986  
Nama Ayah : Sudarman  
Nama Ibu : Ngatini  
Asal Sekolah : SMA PGRI  
Alamat Kos : Jl. Sorowajan Baru, Bantul, Yogyakarta (55821)  
Alamat Rumah : Jl. Amarta III, Desa Wonosari, Kec. Tahunan Kab. Jepara  
E-mail : The \_pooh02@ymail.com  
No. HP : 081390293608

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. TK tahun lulus
  - b. SD/MI tahun lulus 2000
  - c. SMP/MTs tahun lulus 2002
  - d. SMA/MA tahun lulus 2008
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Raudhotul Mubtadiin

### **C. Forum Ilmiah/ Diskusi/ Seminar**

1. Seminar Program Nasional Penanggulangan Terorisme di Kampus Oleh BNPT
2. Seminar Dialog Lintas Agama
3. Seminar Nasional KPK
4. Pelatihan Gide “Pariwisata Berbasis Islamic Tourism”
5. Peserta Seminar Sejarah “Meneropong Pancasila Dalam Prespektif Islam Dan Komunisme”.
6. Peserta Seminar Nasional “Indonesia Bebas Dari Korupsi Dan Mafia Peradilan”.
7. Dialog Kebangsaan “Mempertegas Agama Dalam Menyelesaikan Problematika Kebangsaan”.
8. Peserta Dialog Kebangsaan” Membentengi NKRI Dari Berbagai Ancaman; Menuju Persatuan Dan Kesatuan Yang Kokoh”

**D. Pengalaman Organisasi**

1. OSIS SMA (Sebagai Ketua)
2. Pecinta Alam SMA
3. Ikatan Mahasiswa Daerah; MASKARA
4. Komunitas Mahasiswa Sejarah Adab dan Ilmu Budaya
5. Senat Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
6. Pengurus Rayon PMII Fak, Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Pengurus Cabang PMII DI. Yogyakarta

Yogyakarta, 07 Agustus 2012

**A. Fuad**

Nim: 08120057